KANTOR WILAYAH

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA 2020

PENGAYOMAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA

JL. CENGKEH AFO NO. 40 TERNATE

Kata Pengantar

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil Kemenkumham Maluku Utara atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran Kantor Wilayah Maluku Utara dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewujudkan Good Governance, Clean Governance, serta tetap dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dimasa yang akan datang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara

Husni Thamrin

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang terdiri dari

SASARAN STRATEGIS

1. Membentuk peraturan perundangundangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama 28 → Diemban Melalui 9 Program

PENILAIAN IKPA

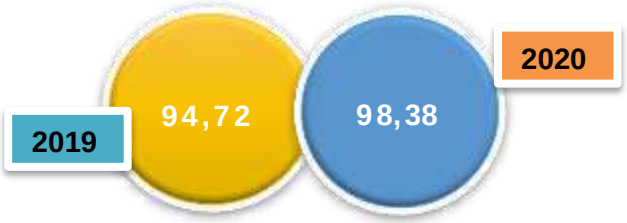

PENILAIAN SMART

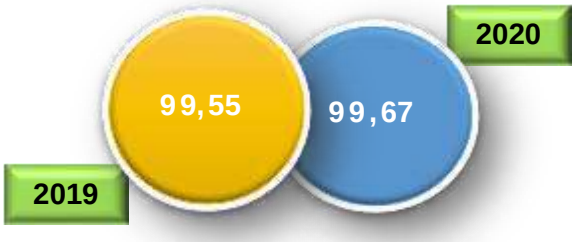

Kinerja Keuangan 9 DIPA Kanwil Kemenkumham Malut 2020

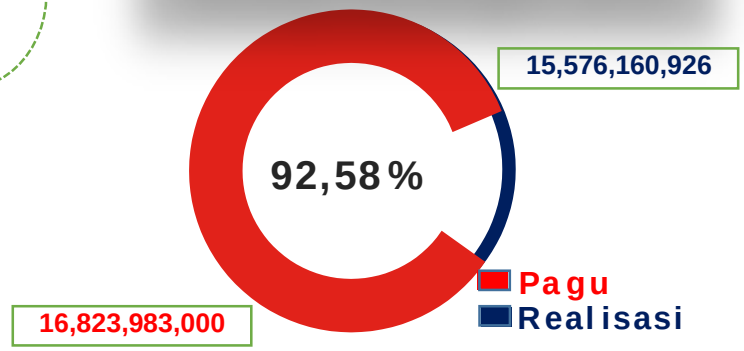

Refocusing Anggaran Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Rp 924.658.000

IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melaui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau yang sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja selanjutnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat mendorong terlaksananya kinerja pemerintahan yang transparan, efektif serta mengedepankan efisiensi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance).*

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara hampir memenuhi target dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 (per 31 Desember 2020) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 9 DIPA adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (9 DIPA)
   DIPA (Rp) : Rp 16.823.983.000,- Realisasi (Rp) : Rp 15.576.160.926,-
   Persentase (%) : 92,58%
2. Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (15 Satker)
   DIPA (Rp) : Rp 84.496.052.000,- Realisasi (Rp) : Rp 79.449.033.153,-
   Persentase (%) : 94,03%
3. Realisasi Anggaran Keseluruhan (9 DIPA dan 15 Satker)
   DIPA (Rp): Rp 101.320.035.000,- Realisasi (Rp) : Rp 95.025.194.079,-
   Persentase (%) : 93,79%

Dengan demikian agar terpenuhinya sasaran tersebut yang menjadi target rencana program / kegiatan pada tahun 2020 adalah :

- DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Melaksanakan 9 DIPA/ Program antara lain :
  1. Sekretariat Jenderal
  2. Ditjen AHU

3. Ditjen Pemasyarakatan
4. Ditjen Imigrasi
5. Ditjen KI
6. Ditjen PP
7. Ditjen HAM
8. BPHN
9. BALITBANG KUMHAM

❖ Rencana Program

A. Divisi Administrasi
   - ➢ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM (Sekjenkumham)

B. Divisi Pemasyarakatan
   - ➢ Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Ditjenpas)

C. Divisi Pelayanan Hukum
   - ➢ Program Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
   - ➢ Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (Ditjen KI)
   - ➢ Program Pembentukan Hukum (Ditjen PP)
   - ➢ Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM (Ditjen HAM)
   - ➢ Program Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
   - ➢ Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM (Balitbang HAM)

D. Divisi Imigrasi
   - ➢ Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Ditjenim)

Ke depan untuk mencapai rencana startegis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, maupun penguatan koordinasi dengan berbagai Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 101,320,035,000 telah direalisasi sebesar Rp 95,025,194,079 atau 93,79%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

“PRESTASI YANG DIPEROLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA TAHUN 2020”

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara meraih penghargaan peringkat III realisasi anggaran terbaik dari KPPN Ternate dan kategori tertib penggunaan Barang Milik Negara (BMN) KPKNL Ternate dalam acara KPPN Award.

Prestasi Terbaik Pertama Capaian Pelaksanaan Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) kategori “Meningkatnya Jumlah Pelapor Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Wilayah Tahun 2020”

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menorehkan prestasi prestisius dengan meraih penghargaan atas peran serta dalam inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal terbanyak di Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Maksud Dan Tujuan..... 3
C. Dasar Hukum..... 3
D. Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi..... 3
E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi..... 15
F. Sistimatika Penulisan..... 17

BAB II : PERENCANANAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS..... 19
B. PERJANJIAN KINERJA..... 20
1. Divisi Administrasi..... 21
2. Divisi Pemasyarakatan..... 23
3. Divisi Keimigrasian..... 24
4. Divisi Pelayanan Hukum DAN HAM..... 25
4.1 Program Administrasi Hukum Umum..... 25
4.2 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.. 26
4.3 Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM..... 28
4.4 Program Pemajuan HAM..... 29
4.5 Program Pembinaan Hukum Nasional..... 30
4.6 Program Pembentukan Hukum..... 31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
1. Divisi Administrasi..... 33
Capaian Kinerja..... 37
Realisasi Anggaran..... 38
Analisa..... 38
2. Divisi Pemasyarakatan..... 39
Capaian Kinerja..... 41
Realisasi Anggaran..... 43
Analisa..... 44
3. Divisi Keimigrasian..... 45
Capaian Kinerja..... 47
Realisasi Anggaran..... 50
Analisa..... 50
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM..... 51
4.1 Program Administrasi Hukum Umum..... 52
Capaian Kinerja..... 54
Realisasi Anggaran..... 55
Analisa..... 55

4.2 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual..... 55
Capaian Kinerja..... 57
Realisasi Anggaran..... 61
Analisa..... 61
4.3 Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.....62
Capaian Kinerja..... 63
Realisasi Anggaran..... 63
Analisa..... 63
4.4 Program Pemajuan HAM..... 64
Capaian Kinerja..... 65
Realisasi Anggaran..... 65
Analisa..... 65
4.5 Program Pembinaan Hukum Nasional.....66
Capaian Kinerja..... 67
Realisasi Anggaran..... 68
Analisa..... 68
4.6 Program Pembentukan Hukum.....68
Capaian Kinerja..... 70
Realisasi Anggaran..... 70
Analisa..... 71

Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran..... 70

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja..... 79

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82

LAMPIRAN :

- Foto / Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020
- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas dan penegakan supremasi hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; pelayananan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi dilingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Ternate yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Maluku Utara terletak di Jl. Cengkeh Afo No 40.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berada di 8 (Delapan) kabupaten dan 2 (Dua) kota yaitu: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pelaksanaanya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariatif, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja. Sedangkan hal-hal yang menjadi kelemahan serta ancaman di antaranya ialah penyelenggaraan layanan publik kementerian yang masih belum optimal, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, serta penyelenggaraan kinerja Kementerian/Lembaga lain yang tidak berkeseinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah telah membuat petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur dan perwujudan pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* terkait atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance*;
3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

“Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi:

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

TUGAS	FUNGSI
DIVISI ADMINISTRASI melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; 3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; 4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara; 5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
Bagian Program dan Hubungan Masyarakat melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.	1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; 2. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; 3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan; 4. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah	1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian; 2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara; 3. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

TUGAS	FUNGSI
DIVISI PEMASYARAKATAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah	1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama	1. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan 2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.
Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan	1. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi,

Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.	pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan 2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
DIVIS KEIMIGRASIAN Melaksanankan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah	1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian; 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, system dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.	1. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian; 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan system dan teknologi informasi keimigrasian.
Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.	1. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

TUGAS	FUNGSI
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.	1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 3. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum,

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.	bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundangundangan dan penyuluh hukum di wilayah.
Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pelaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Keempat divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- Bagian Umum
  - Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
  - Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
  - Subbagian Program dan Pelaporan
  - Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
  - Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
  - Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
  - Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
  - Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
  - Subbidang Perijinan Keimigrasian
  - Subbidang Informasi Keimigrasian
- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
  - Subbidang Intelijen Keimigrasian
  - Subbidang Penindakan Keimigrasian

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- Bidang Pelayanan Hukum
  - Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
  - Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- Bidang Hukum
  - Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
  - Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
- Bidang Hak Asasi Manusia
  - Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
  - Subbidang Pengkasian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan terdapat 717 Pegawai yang tersebar di 16 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki 100 pegawai yang tersebar di empat divisi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, berdasarkan gender, divisi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

❖ **Berdasarkan Gender**

Laki-Laki	Perempuan
58	42

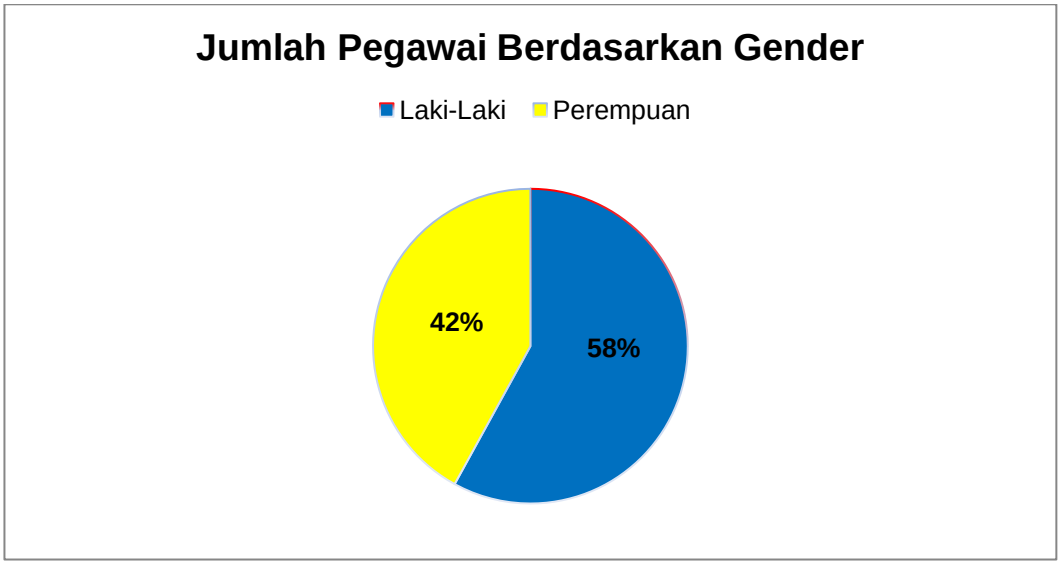

❖ **Berdasarkan Divisi**

Divisi	Laki-Laki	Perempuan
Administrasi	24	18
Pemasyarakatan	7	4
Keimigrasian	9	4
Pelayanan Hukum dan HAM	18	17
Jumlah	58	42

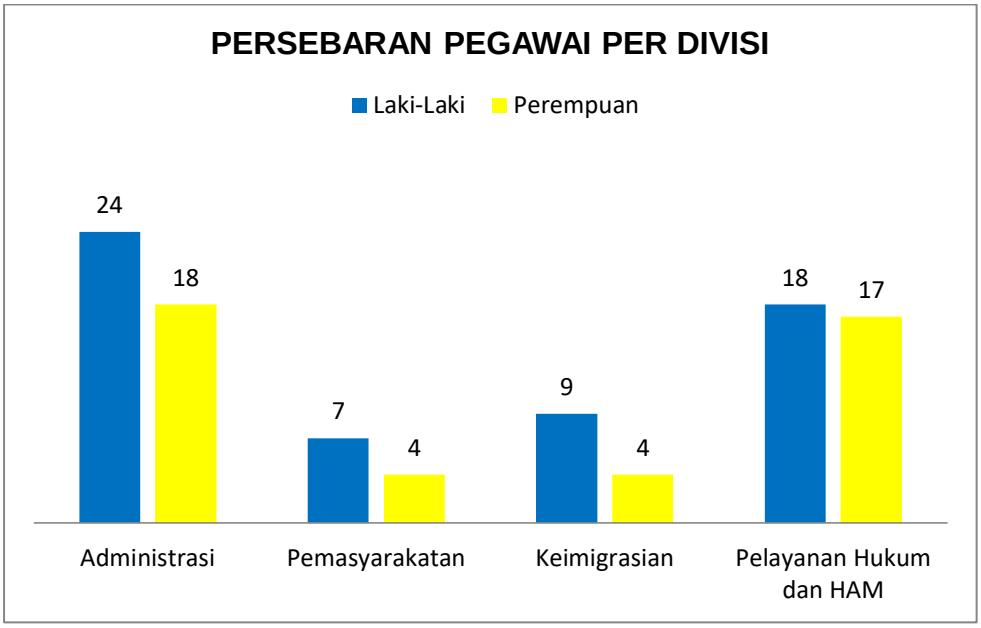

❖ **Berdasarkan Golongan**

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
II/a	1	1
II/b	1	1
II/c	2	1
II/d	5	1
III/a	12	18
III/b	8	9
III/c	8	10
III/d	6	1
IV/a	8	-
IV/b	6	-
IV/c	1	-
IV/d	-	-
Jumlah	58	42

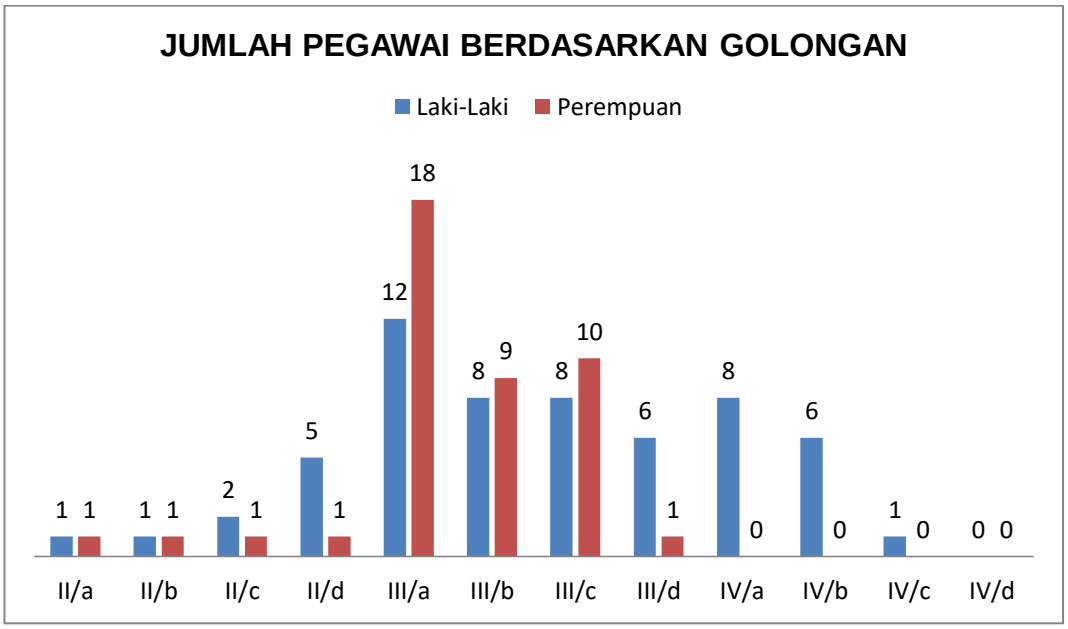

❖ **Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Struktural	21	7
JFT	9	5
JFU	28	30
Jumlah	58	42

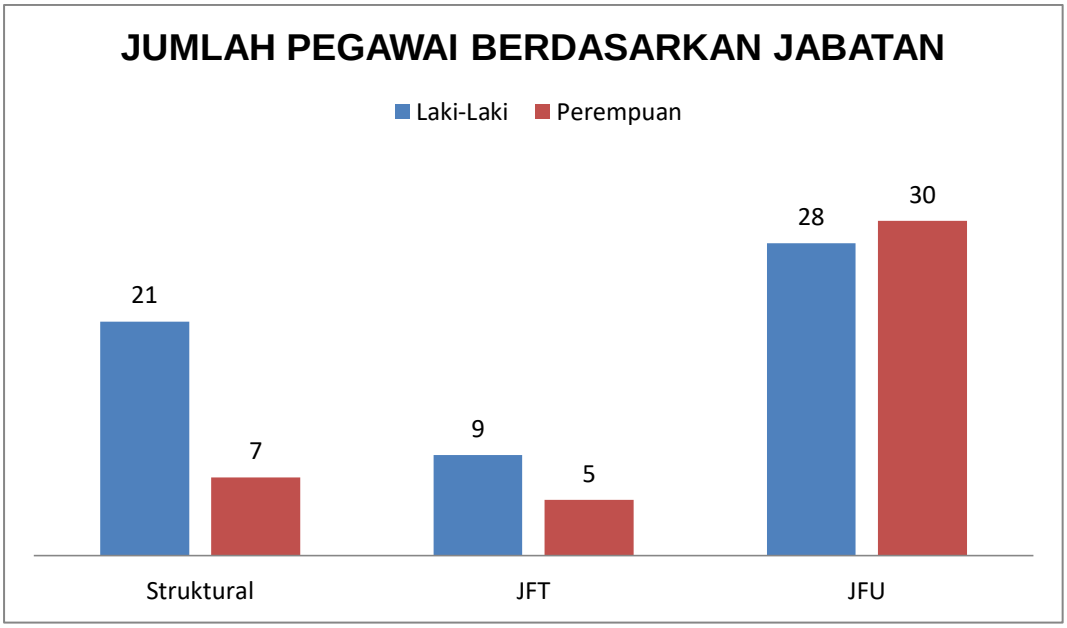

❖ **Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada di Lingkungan Kanwil Maluku Utara**

No	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kanwil Maluku Utara	58	42	100
2	Lapas Ternate	49	13	62
3	Lapas Tobelo	46	8	54
4	Lapas Sanana	45	10	55
5	Lapas Jailolo	35	4	39
6	Lapas Labuha	32	5	37
7	Rutan Ternate	46	9	55
8	Rutan Soasio	28	9	37
9	Rutan Weda	14	3	17
10	LPKA Ternate	42	12	54
11	LPP Ternate	12	48	60
12	Rupbasan Ternate	17	4	21
13	Bapas Ternate	27	12	39
14	Bapas Tidore	7	3	10
15	Kanim Ternate	42	12	54
16	Kanim Tobelo	18	5	23
TOTAL		518	199	717

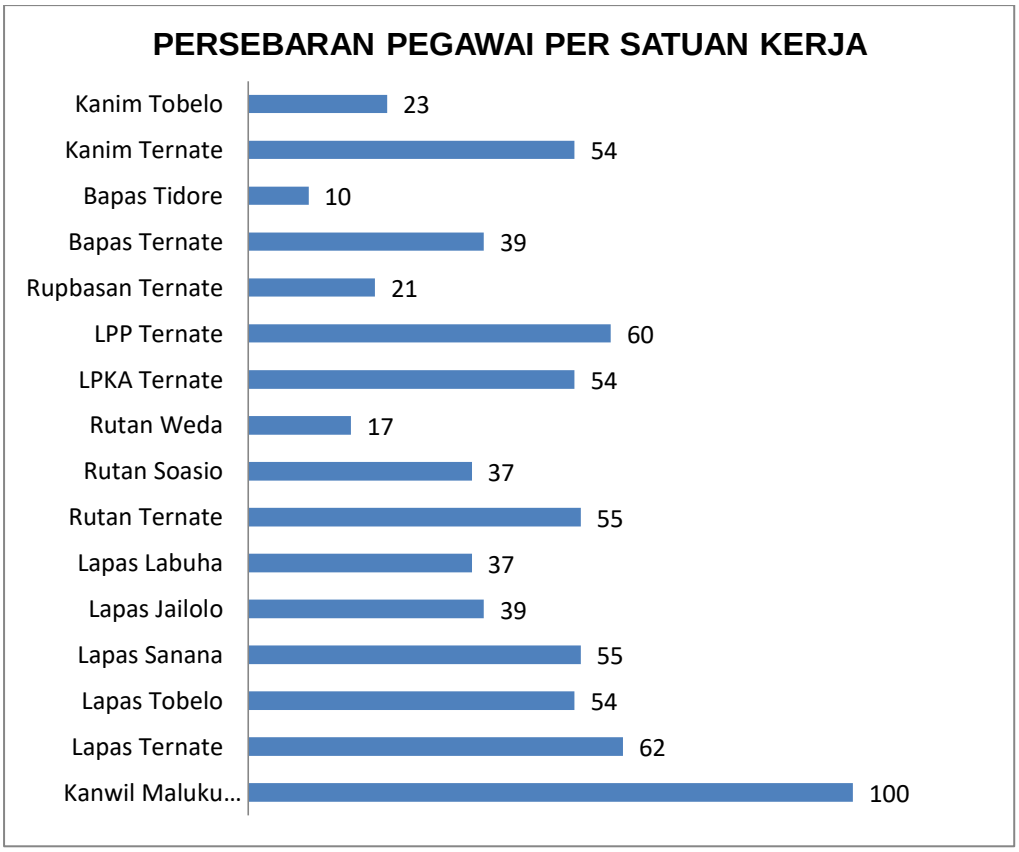

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, sebagai berikut:

No	UPT	ALAMAT
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO	**Jalan Terusan Galela Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara Kab. Halut** **Email:lapas2btobelo@gmail.com**
2	RUTAN KELAS IIB SOASIO	**Jalan M.T Haryono Kota Tidore Kepulauan Telp. (0921) 3161259** **Email : rutansoasio@yahoo.com**
3	RUTAN KELAS IIB WEDA	**Jalan Lintas Halmahera Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah** **Telp. 082393782666** **Email : rutan_weda@yahoo.co.id**
4	RUTAN KELAS IIB TERNATE	**Jalan Pengayoman Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate** **Email : rutan.kelas.iib.ternate@gmail.com**
5	KANIM KELAS I TERNATE	**Jalan SKSD Palapa No. 388 Ternate** **Telp/Fax : (0921) 3121568/3125598** **Email : imigrasi_ternate@yahoo.com** **Website : http//ternate.imigrasi.go.id**
6	LPP KELAS III TERNATE	**Jalan Hasan Senen No. 1 Kelurahan Muhajirin Kota Ternate** **Email : lpp.ternate@gmail.com**
7	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE	**Jalan Tugu Makugawene Kalumata** **Telp : (0921) 3124256** **Email : tu.bapas.ternate@gmail.com**
8	RUPBASAN KELAS II TERNATE	**Jalan Pengayoman Kelurahan Jambula Kota Ternate** **Telp./Fax : (0921) 3120081** **Email : rupbasanternate@yahoo.co.id**
9	LPKA KELAS II TERNATE	**Jalan Hasan Senen No.1 Kel. Muhajirin Kota Ternate** **Email : lpkaternate@gmail.com**
10	LAPAS KELAS IIB JAILOLO	**Jalan buah-buah Jailolo Kab. Halmahera Barat** **Email : pas4lpjailolo@gmail.com**
11	LAPAS KELAS IIA TERNATE	**Jalan Pengayoman, Kel.Jambula, Pulau Ternate.** **No.Tlp : (0921) 3120082** **Email: ternate_lapas@yahoo.co.id** **Website:lapasternate.kemenkumham.go.id**
12	LAPAS KELAS IIB SANANA	**Jalan Sogi** **Telp/Fax : (0929) 2221180/2221067** **Email : lapassanana@gmail.com** **Website : lapas2bsanana.wordpress.com**

13	KANIM KELAS II TOBELO	**Jalan Gorua Selatan** **Telp/Fax : (0924) 2622379** **Email : kanim.tobelo@gmail.com**
14	LAPAS KELAS III LABUHA	**Jalan Karet Putih Desa Kampung Makian** **Email : cab.rutanlabuha@gmail.com**
15	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE	**Dowora, Tidore Kepulauan** **Telp :** **Email : bapastidore@gmail.com**

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

No	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
	DIVISI ADMINISTRASI	
1	Penyampaian dokumen usulan anggaran tidak tepat waktu	Meningkatkan sinergisitas antar Divisi dan Satuan Kerja terkait jadwal penyampaian dokumen usulan anggaran, sesuai dengan pedoman perencanaan penganggaran yang telah ditetapkan.
2	Pada masa pandemi Covid-19, Kegiatan rapat koordinasi baik dengan instansi luar maupun Satuan Kerja dan kegiatan monitoring evaluasi ke Satuan Kerja tidak dapat dilaksanakan.	Kegiatan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara virtual, baik melalui email, aplikasi Zoom, WA Grup, serta pemantauan melalui pengisian aplikasi online (E-Performance, Smart, E-Monev, dan Tarja)
3	Masih adanya pegawai yang kurang sadar akan ketertiban	Dengan diberlakukannya barisan koreksi pada setiap apel pagi, dimana barisan koreksi merupakan barisan yang diisi bagi pegawai yang melanggar ketertiban baik berupa terlambat datang saat apel pagi maupun tidak lengkap/sesuainya atribut pegawai yang dikenakan sehingga diharapkan dapat menciptakan rasa malu dan jera
4	Masih adanya masalah ketika terjadi pemotongan tunjangan kinerja pegawai	Integrasi Absensi berbasis SIMPEG diharapkan mampu menjadi media yang tepat guna memberikan informasi secara terbuka kepada pegawai terkait kehadiran dan jurnal harian serta dapat secara langsung terhubung dengan pemotongan tunjangan kinerja apabila terjadi keterlambatan atau tidak masuk

		kerja, dan itu semua dapat diakses secara mandiri oleh pegawai.
	Tidak adanya rekonsiliasi bulanan karena ditiadakan oleh ditjen perben akibat Covid-19	Penyelesaian pada rekonsiliasi tahun 2020 melalui virtual
5	Target pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat terpenuhi karena adanya Pandemi Covid 19 dan sulitnya penyerapan anggaran	Penghematan dan Pengalihan anggaran ke belanja penanganan dan pencegahan Covid-19
6	Pergantian operator baru pada Satker yang mengakibatkan sebagian tugas dan fungsi menjadi lambat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data secara cepat dan akurat	Menyampaikan kepada satker agar pengkaderan bidang administrasi Keuangan dan BMN tidak secara serta merta namun secara bertahap.
7	Kurangnya sinergitas kerja pada saat penyusunan laporan	Sering dilakukan rapat bersama
8	Anggaran yang terlalu minim terkait kegiatan peliputan	Pengajuan anggaran yang diperhitungkan dengan matang
9	Pembayaran pertanggung jawaban yang belum sesuai dengan SOP pembayaran	Melaksanakan SOP pembayaran dengan disiplin
10	Beban tugas yang terlalu besar sehingga menyebabkan tumpang tindih Tugas dan Fungsi antar Pegawai	Pembagian tugas yang sesaui dengan Implementasi Tugas dan Fungsi
DIVISI PEMASYARAKATAN		
11	Adanya penyebaran penyebaran Corona Virus Desease 19 (Covid – 19) mengakibatkan beberapa kegiatan yang ada di Divisi terkendala, sehingga penyerapan Anggaran pada Tahun 2020 kurang maksimal	Kegiatan dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan protocol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah
DIVISI KEIMIGIRASIAN		
12	Diterapkannya Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.01-2144 Tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020, sehingga menurunnya PNBP Imigrasi.	Setelah diterapkan Tatanan Norma Baru/New Normal mendorong UPT melaksanakan inovasi jemput bola/mobile/pelayanan paspor keliling dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. - Membuka layanan Eazy Paspor - Melakukan reschedule pelayanan paspor simpatik
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
13	Pelaporan notaris online belum memiliki payung hukum secara nasional, sehingga pengisian Aplikasi Pelaporan Notaris belum optimal.	Segera dibentuk payung hukum mengenai pelaporan notaris online, agar setiap notaris tertib administrasi dalam pelaporan, memudahkan pengawasan, dan

		Ditjen AHU dapat memperoleh informasi yang akurat dalam pengembangan kapasitas notaris di Indonesia.
14	Kurangnya jumlah SDM pada Sub Bidang Pelayanan AHU karena pada praktek sehariharinya melaksanakan sekaligus: Pelayanan Loket AHU, Pengawasan Notaris (MPDN), Pelaksanaan kegiatan manisfestasi dari DIPA AHU.	Penambahan SDM JFU Penyusunan laporan/ pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas.
15	Kurangnya Sumber Daya Manusia Pelayanan KI	Diperlukan Penambahan/Perbantuan Pegawai
16	Belum adanya keseragaman pada setiap pemerintahan daerah terkait kedudukan Perancang Peraturan Perundangundangan	Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah
17	Keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa mengakomodir permintaan 10 Kabupaten/ Kota	Mengirimkan tanggapan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Hasil kajian peraturan daerah yang belum terjangkau (jauh)
18	Adanya Pandemi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang	Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan melalui media online
19	Kurangnya SDM sehingga kegiatan kurang maksimal terutama pada kegiatan YANKOMAS karena tidak ada tenaga analis hukum sehingga rekomendasi yang diharapkan belum maksimal	Meminta bantuan tenaga perancang perundang-undangan yang ada di Bidang Hukum
20	Kurangnya sarana prasarana dalam melaksankan kegiatan antara lain Komputer, kendaraan untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi	Meminta bantuan pada bagian umum untuk memaksimalkan kegiatan
21	Tidak tersedianya SDM JDIH yang memiliki keahlian khusus	Mengoptimalkan SDM yang tersedia
22	Adanya wabah Covid19 sehingga ada perubahan kegiatan	Penyelesaian target kinerja secara cepat

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara ini dilakukan dengan mengumpulkan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran program yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan LKIP ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2020. Selanjutnya menjelaskan analisisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2020 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6**, **7** dan **8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi :
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar peniliaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang memiliki 4 (empat) divisi, pada tahun 2020 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah.

Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2020 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Formulasi Perjanjian Kinerja TA. 2020 tersebut memungkinkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk menyusun Perencanaan Kinerja, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Proses penyusunan Perencanaan Kinerja juga harus didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan tolak ukur dasar penilaian kinerja kegiatan/program. Perencanaan kinerja selanjutnya disusun dalam suatu dokumen rencana kerja, program kerja dan kalender kerja serta dokumen disbursement plan. Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas, merupakan faktor penentu tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam bab ini akan dijelaskan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja setiap divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020.

1. Divisi Administrasi

❖ **Perencanaan Kinerja**

Divisi Administrasi sebagai divisi yang memiliki fungsi pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah. Sesuai Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA : SP DIPA- 013.01.2.649022/2020, program ini menetapkan sasaran

kegiatannya pada tersedianya layanan pengelolaan administratif dan fasilitatif kantor wilayah. Petikan DIPA tersebut juga mensyaratkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi harus mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Berikut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan rencana kegiatan Divisi Administrasi yang dijabarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor SP DIPA- 013.01.2.649022/2020:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
Tersedianya layanan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	1 dokumen
	2. Layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	1 layanan
	3. Layanan keuangan yang akurat dan akuntabel.	1 layanan
	4. Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan.	1 layanan
	5. Layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.	1 layanan
	6. Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar	1 layanan
	7. Layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan.	1 layanan

❖ **Perjanjian Kinerja**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,1 Indeks
	2. Nilai Reformasi Birokrasi	85 Nilai RB
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85 Nilai LKIP

Program	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
Jumlah Anggaran	**Rp.11.255.206.000,-**

2. Divisi Pemasyarakatan

A. Perencanaan Kinerja

Sebagai divisi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menjalankan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Sesuai Tusi yang diemban Divisi Pemasyarakatan dan Daftar Isian Pelaksanaan Petikan (DIPA) Nomor SP DIPA-013.05.2.649024/2020, fokus utama sasaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan rencana kegiatan Divisi Pemasyarakatan TA. 2020, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah	UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	13 UPT

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program Pembinaan dan Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020 menyusun Perjanjian Kinerjanya sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan perlakuan Pelanggar Hukum yang berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%
2	Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar.	90%
3	Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang berdaya Guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersetifikat.	100%
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang taat hukum	Menurunnya Presentase Residivis	1%
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	90%

Program	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp.889.924.000,-**

3. Divisi Keimigrasian

A. Perencanaan Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, mengamanatkan Divisi Keimigrasian melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Keimigrasian melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 013.06.2.649025/2020, dimana sasaran kegiatannya difokuskan pada pembinaan dan pengawasan UPT imigrasi. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan rencana kegiatan Divisi Keimigrasian TA. 2020, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	52 Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	36 LHK

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai Perencanaan Kinerja Divisi Keimigrasian dan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Imigrasi di Tahun Anggaran 2020 tersebut diatas, disusunlah Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3 Indeks
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah	2 %

Program	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Jumlah Anggaran	**Rp. 1.514.904.000,-**

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM merupakan divisi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya. Sesuai tusi yang diemban, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan 6 (enam) program, berikut Perencanaan Kinerja dan Perjanjian kinerja setiap program pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun 2020:

4.1 Program Administrasi Hukum Umum

A. Perencanaan Kinerja

Program Administrasi Hukum Umum (AHU) dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 45 ayat 1, Subbidang ini bertugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil, peroordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sesuai dengan Tusi tersebut dan SP DIPA- 013.03.2.649023/2020, maka disusunlah Perencanaan Kinerja Program AHU Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, yang diuraikan sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU	3.0
		Presentasi Layanan Program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh Program AHU, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Program AHU Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU	3.0
		Presentasi Layanan Program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%

Program	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp. 2.260.000.000,-**

4.2 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

A. Perencanaan Kinerja

Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (KI) dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 45 ayat 2, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. Sesuai dengan Tusi dan NOMOR : SP DIPA-013.07.2.649026/2020, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyusun Perencanaan Kinerjanya sebagai berikut ;

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	50 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder
2	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (KI), maka disusunlah Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	50 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder
2	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus

Program	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp. 504.732.000**

4.3 Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

A. Perencanaan Kinerja

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Program Pemajuan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 53 ayat 1, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Sesuai dengan Tusi dan NOMOR : SP DIPA-013.09.2.649028/2020, Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia menyusun Perencanaan Kinerjanya sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	3 Rekomendasi
		Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota
2	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh Program Pemajuan Hak Asasi Manusia, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklajuti hasil Desiminasi dan	1 Instansi Pemerintah

		Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomentasi

Program	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp 277.061.000,-**

4.4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

A. Perencanaan Kinerja

Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 53 ayat 2, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hokum dan hak asasi manusia. Sesuai dengan Tusi dan NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.649030/2020, Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM menyusun Perencanaan Kinerjanya sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60%
2	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah.	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja diatas, Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM menyusun Perjanjian Kinerjanya yang didukung anggaran sebesar Rp. 70.048.000,- sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentasi rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di sosialisasikan di wilayah	1 buku

Program	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp 70.048.000,-**

4.5 Program Pembinaan Hukum Nasional

A. Perencanaan Kinerja

Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Program Pembinaan Hukum Nasional dilaksanakan oleh Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 49 ayat 2, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Sesuai dengan Tusi dan Nomor: SP DIPA- 013.10.2.649029/2020, Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum menyusun Perencanaan Kinerjanya sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
1	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	63 Orang
		Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah

		Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh Program Pembinaan Hukum Nasional, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	63 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui JDIHN	1 Kantor Wilayah

Program	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp 940.841.000,-**

4.6 Program Pembentukan Hukum

A. Perencanaan Kinerja

Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Program Pembentukan Hukum dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 49 ayat 1, Subbidang ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah. Sesuai dengan Tusi dan NOMOR : SP DIPA-013.08.2.649027/2020, Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menyusun Perencanaan Kinerjanya sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET KINERJA
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	10 Raperda
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangundangan	Jumlah perancang peraturan perundangundangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tusi dan Perencanaan Kinerja yang ditetapkan oleh Program Pembentukan Hukum, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Program Pembentukan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara TA. 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Perda
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah perancang peraturan perundangan-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang

Program	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di wilayah
Jumlah Anggaran	**Rp 152.841.000,-**

Rekapan Anggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Hukum Umum	Rp.2.260.000.000,-
2.	Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Rp.504.732.000,-
3.	Penelitian & Pengembangan Kementerian Hukum & HAM	Rp.70.048.000,-
4.	Pemajuan HAM	Rp.940.841.000,-
5.	Pembinaan Hukum Nasional	Rp.277.061.000,-
6.	Pembentukan Hukum/Perundang-undangan	Rp.152.448.000,-
Jumlah		**Rp. 4.205.130.000,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi tahun anggaran.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} x\ 100$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} x\ 100$$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2020 telah tercapai sebagaimana berikut.

1. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di

wilayah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Selama tahun anggaran 2020 Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam tahun anggaran tersebut, berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh keempat Sub Bagian pada Divisi Administrasi :

Terlaksananya Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan

Pencapaian untuk indikator jumlah dokumen perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan didukung oleh terselesaikannya perencanaan anggaran Tahun 2021 melalui kegiatan penyusunan anggaran yang terdiri dari pagu usulan, pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Selama kurun waktu tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah menyelesaikan laporan target kinerja baik B03, B06, B09 dan B12 dengan baik dan tepat waktu sehingga menghasilkan nilai yang baik dan sesuai dengan target, bahkan hampir seluruhnya telah mencapai 100%.

Peningkatan Kualitas Layanan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

- ✓ Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk 9 (Sembilan) DIPA sampai per 31 Desember 2020 sebesar 80,60%.
- ✓ Terlaksananya Revisi 9 DIPA;
- ✓ Terlaksananya refocusing anggaran covid 19;
- ✓ Pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan uang makan pegawai selama tahun 2020 terlaksana secara akurat dan tepat waktu;

Selama tahun 2020 melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

- ✓ Pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Januari 2020;
- ✓ Pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 10 Juli 2020;
- ✓ Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 secara

virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 16 Juli 2020.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara meraih penghargaan peringkat III realisasi anggaran terbaik tahun 2019 dari KPPN Ternate dan kategori tertib penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019 dari KPKNL Ternate dalam acara KPPN Award.

Peningkatan kualitas layanan kepegawaian yang tepat waktu

Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga telah memberikan pelayanan baik dalam hal kepegawaian maupun ketatausahaan yang mendukung tercapainya target sebagaimana tersebut di atas. Adapun layanan tersebut di antaranya ialah pengusulan kenaikan pangkat, mutasi, pembuatan kartu pegawai, kartu peserta Taspen, Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan Metode *E-Learning*, pengurusan satya lencana, rekomendasi tugas belajar dan izin belajar, dan juga pengajuan pensiun serta layanan persuratan yakni surat masuk maupun surat keluar.

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengambilan Sumpah ASN 2018	7 Februari 2020	34 ASN
2	Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara	26 Maret 2020	Kepala Kantor Wilayah
3.	Pelantikan dan Pengambilan sumpah pejabat Struktural Eselon III dan IV	16 Juli 2020	14 Pejabat
4.	Kegiatan Rapid Test	19 Juni 2020 9 November 2020	Seluruh pegawai Kantor WIlayah
5.	Pelaksanaan pengadaan Test CPNS TA 2019	September – Oktober 2020	45 CPNS
6.	Internalisasi Kepala Kantor Wilayah ke UPT	Januari – Desember 2020	UPT se- Maluku Utara
7.	Kegiatan Rapid Test	19 Juni 2020 9 November 2020	Seluruh pegawai Kantor WIlayah
8.	Perayaan HDKD bersama keluarga besar Hukum dan HAM Maluku Utara Dengan Tema “Pelayanan Publik Digital Menuju Indonesia Maju”	21 Oktober 2020	Pembagian Masker gratis untuk masyarakat
9.	Penerapan Protokol Kesehatan	Maret - Desember 2020	Pegawai Kantor Wilayah

Berikut ini adalah hasil yang dicapai pada tahun 2020

1. Terlaksananya tata kelola persuratan (surat dinas keluar dan masuk), yaitu tersedianya arsip data surat keluar dan masuk secara elektronik;
2. Terlaksananya penerimaan pengadaan CPNS TA 2019;
3. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi dasar bagi CPNS sebelum pelaksanaan tugas di UPT;
4. Terisinya jabatan administrasi sesuai dengan permenkumham 30 tahun 2018;

5. Terlaksananya pelantikan pejabat fungsional;
6. Terjalinnya kerjasama dan sinergisitas yang baik antara pihak Kemenkumham dan BKN Regional;
7. Terlaksananya pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai;
8. Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dengan lancar;
9. Terpenuhinya hak cuti pegawai melalui persetujuan cuti;
10. Terlaksananya pemberian punishment bagi pegawai;
11. Terlaksananya pengusulan pensiun bagi pegawai secara tepat waktu;
12. Terlaksananya pengelolaan tugas bidang kepegawaian yang lebih optimal;
13. Terlaksananya pelaksanaan diklat dengan metode e-learning.
14. Terlaksananya pengumuman akhir penerimaan CPNS 2019.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan / dipublikasikan kepada masyarakat

Selama tahun 2020, Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Selain itu, dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi senantiasa melakukan dokumentasi dan publikasi terkait kegiatan yang dilakukan yang disebarluaskan melalui media cetak seperti majalah dan buletin serta media sosial seperti pada laman resmi www.malut.kemenkumham.go.id akun YouTube, facebook, twitter dan instagram.

a) Peliputan dan Penyusunan Berita Kegiatan selama tahun 2020 dan di publikasikan di website, Instagram, facebook, twitter maupun majalah kantor wilayah.
b) Pemaksimalan Teknologi Informasi telah berhasil dilaksanakan dengan keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran, hal ini merupakan dukungan pada program e-government.
c) Publikasi kegiatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara selama tahun 2020 dalam bentuk: pembuatan laporan, Virtual metting teleconference melalui aplikasi zoom Meeting, iklan dan press conference, dokumentasi, spanduk, backdrop, banner dll.

Di samping itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara juga telah melaksanakan koordinasi baik di internal maupun eksternal. Beberapa kegiatan koordinasi dan audiensi dengan pihak eksternal di antaranya ialah:

- Audiensi dengan Kapolda Provinsi Maluku Utara;
- Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara;

- Audiensi dengan Ombudsman Provinsi Maluku Utara;
- Audiensi dengan BPKP Provinsi Maluku Utara;
- Audiensi dengan BNNP Provinsi Maluku Utara;
- Audiensi dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara;
- Audiensi dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara;
- Kunjungan serta audiensi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Kunjungan serta audiensi dengan Pemerintah Kota Ternate;

- **Capaian Kinerja**

Dalam upaya memenuhi Perjanjian Kinerja TA. 2020, Divisi Administrasi telah melakukan berbagai usaha termasuk melaksanakan seluruh perencanaan kinerja yang telah ditetapkannya. Tujuan dilaksanakannya seluruh rencana kinerja tersebut tidak lain untuk memberikan layanan administrasi terbaik kepada stakeholder termasuk para pegawai dan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan terpenuhinya capaian penilaian Akuntabilitas. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan, seluruh rencana kegiatan telah dilaksanakan dan menghasilkan capaian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	7,1 Indeks	9,3 Indeks dg 10 kriteria (18,67 dg 20 kriteria penilaian)	130,98 %
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85 Nilai RB	78,22 Nilai RB	92,02 %
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85 Nilai LKIP	85 Nilai LKIP	100%

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 yang dapat diakses melalui https://survei.balitbangham.go.id/ly/fiAJy67E per tanggal 31 Desember 2020, terkait Survei Integritas Internal Organisasi oleh Balitbangham kepada seluruh pegawai pada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menunjukkan angka yang tinggi, yaitu mencapai indeks 18,67 (dengan 20 kriteria), dan jika dikonversi dalam

penilaian 10 kriteria maka dapat diartikan IKM Layanan Internal Kantor Wilayah mendapatkan indeks 9,3 dan masuk dalam kreteria penilaian "Sangat Baik".

Hal ini menunjukkan pegawai pada Kantor Wilayah merasa puas terhadap pelayanan internal Kantor Wilayah. Pembangunan Zona Intergritas Menuju WBK/WBBM merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dan sebagai Instansi yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah telah mengikuti On Desk Evaluation Pembangunan Zona Intergritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Juni 2020 secara virtual.

Berdasarkan Berita Acara Panel Hasil Evaluasi Satuan kerja Menuju WBK/WBBM yang dikeluarkan Inspektorat Wilayah V Tahun 2020, Kantor Wilayah mendapatkan nilai 78,22 sehingga berhak untuk maju dalam kontestasi pemilihan Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM tingkat nasional yang penilaiannya akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN-RB. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan dan HAM Maluku Utara Belum berhasil mendapatkan perdikat WBK dari Kementerian PAN-RB pada Tahun 2020.

- **Realisasi Anggaran**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran dan capaian disbursement plan Divisi Administrasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp. 11.255.206.000**	**Rp. 10.244.495.000**	**Rp. 10.058.215.669,-**	**98.18 %**

- **Analisa**

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Divisi Administrasi selama Tahun 2020 diatas menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Sesungguhnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, meskipun demikian Divisi Administrasi tetap berusaha untuk menyelesaikan target capaian kinerjanya. Upaya pencapaian target kinerja dilaksanakan secara seksama dengan menggunakan metode-metode baru.

Saat ini kegiatan layanan administrasi dilaksanakan secara online dan sebagian besar kegiatan rapat koordinasi serta kegiatan pemantauan/ monitoring dilaksanakan secara virtual. Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat/ pertemuan langsung maupun monitoring langsung dibatasi dan pelaksanaannya diawasi ketat sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Capaian Perjanjian Kinerja dalam tahun 2020 menunjukkan kondisi yang baik karena seluruh target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi tahun 2020 telah terpenuhi target.

kontribusi penyerapan anggaran terbesar berasal dari layanan perkantoran (pembayaran gaji/tunjangan pegawai dan operasional kantor). Sebagian besar pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan monitoring langsung terhambat akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kecilnya angka penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut. Hal ini harus diwaspadai, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui revisi anggaran. Anggaran dialihkan pada kegiatan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, selanjutnya dengan tetap memperhatikan target capaian kinerja. Pada akhir tahun 2020 penyerapan anggaran maupun target kinerja Divisi Administrasi mencapai 98,18%.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasyarakatan memiliki fokus utama sasaran kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah. Divisi ini telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kinerjanya. Kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan diantaranya yaitu pembinaan dan pemenuhan hak atas Warga Binaan Pemasyarakatan, menindaklanjuti pemeriksaan pengaduan terkait pelayanan pemasyarakatan baik dari internal pemasyarakatan maupun eksternal pemasyarakatan, serta rangkaian kegiatan dalam rangka menghadapi isu-isu aktual terkait pemasyarakatan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah selama tahun 2020:

NO.	KEGIATAN	TEMPAT/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	Pemberian Remisi	UPT Pemasyarakatan	Pemberian Remisi
2	Pameran	-	-
3	Unit Pelayanan Pengaduan	Divisi Pemasyarakatan	Pengaduan masyarakat
4	Unit Layanan Informasi		
5	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di	Aula Kanwil	

	Wilayah Maluku Utara		
6	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	Muara Hotel	Kegiatan dihadiri oleh Dir Bimkemas dan APH Maluku Utara
7	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Muara Hotel	Dir Kantib Narasumber APH Terkait Maluku Utara
8	Koordinasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	Jakarta	Persoalan Teknis Pemasyarakatan di Maluku Utara
9	Koordinasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Jakarta	
10	Pencegahan dan Penindakan Kamtib	UPT Pemasyarakatan	Satgas Razia Geledah
11	Mutasi/Pemindahan	-	
12	Monitoring & Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	UPT Pemasyarakatan	

Tabel 8. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Malut

No	Satuan Kerja
1	LAPAS KELAS IIA TERNATE
2	LAPAS KELAS IIB SANANA
3	LAPAS KELAS IIB TOBELO
4	LAPAS KELAS IIB JAILOLO
5	LAPAS KELAS III LABUHA
6	RUTAN KELAS IIB TERNATE
7	RUTAN KELAS IIB SOASIO
8	RUTAN KELAS IIB WEDA
9	RUPBASAN KELAS II TERNATE
10	LPP KELAS III TERNATE
11	LPKA KELAS II TERNATE
12	BAPAS KELAS II TERNATE
13	BAPAS KELAS II TIDORE

Secara keseluruhan, kegiatan di Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah berjalan dengan baik. Adapun hambatan yang muncul telah ditemukan solusinya dan dapat diatasi dengan cara melakukan komunikasi, sosialisasi, kerjasama,

pemantauan dan monitoring. Agar kegiatan atau program yang berjalan dapat terus berhasil maka secara kualitas maupun kuantitasnya harus tetap dipantau dan ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Meski demikian, masih perlu dilakukan penambahan dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang.

- **Capaian Kinerja**

  Kegiatan pembinaan UPT Pemasyarakatan pada daftar pelaksanaan kegiatan diatas merupakan upaya Divisi Pemasyarakatan untuk memenuhi target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Dan didapatkan data hasil capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan tahun 2020 sebagai berikut;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	90%	100%
Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar.	90%	90%	100%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersetifikat.	90%	90%	100%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Presentase Residivis	1%	1%	100%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	90%	90%	100%

Rekapitulasi Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan se- Maluku Utara Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tahanan	Napi	Jumlah	Kapasitas	Over Kapasitas
1	LAPAS TERNATE	0	342	342	240	42
2	LAPAS SANANA	19	86	105	85	24
3	LAPAS TOBELO	21	136	157	250	-
4	LAPAS JAILOLO	4	55	59	250	-
5	LAPAS LABUHA	1	102	103	150	-
6	LAPAS PEREMPUAN	11	45	56	60	-
7	LPKA TERNATE	-	15	15	70	-
8	RUTAN SOASIO	31	63	94	100	-
9	RUTAN WEDA	6	26	32	150	-
10	RUTAN TERNATE	115	63	178	122	46
JUMLAH		**208**	**933**	**1141**	**1417**	**81**

Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Berdasarkan UPT

No	UPT	Remisi Umum	Remisi Khusus Idul Fitri	Remisi Khusus Nyepi	Remisi Khusus Waisak	Remisi Khusus Natal	Remisi Khusus Imlek
1	LAPAS TERNATE	207	179	-	-	12	-
2	LAPAS SANANA	67	66	-	-	2	-
3	LAPAS TOBELO	91	48	-	-	49	-
4	LAPAS JAILOLO	50	22	-	-	29	-
5	LAPAS LABUHA	77	68	-	-	7	-
6	LAPAS PEREMPUAN	18	20	-	-	2	-
7	LPKA TERNATE	6	5	-	-	5	-
8	RUTAN SOASIO	59	44	-	-	1	-
9	RUTAN WEDA	13	10	-	-	18	-
10	RUTAN TERNATE	45	50	-	-	4	-
Jumlah		**633**	**512**	**-**	**-**	**129**	**-**

Pelaksanaan Razia / Sidak Satgas Kamtib

No	UPT	TANGGAL	PELAKSANA	Keterangan
1	LAPAS TERNATE	-	-	
2	LAPAS SANANA	22/06/2020	Divisi Pemasyarakatan	
3	LAPAS TOBELO	09/09/2020	Divisi Pemasyarakatan	
4	LAPAS JAILOLO	04/06/2020	Divisi Pemasyarakatan	
5	LAPAS LABUHA	23/01/2020	Divisi Pemasyarakatan	
6	LAPAS PEREMPUAN	25/11/2020	Divisi Pemasyarakatan	
7	LPKA TERNATE	26/11/2020	Divisi Pemasyarakatan	
8	RUTAN SOASIO	10/11/2020	Divisi Pemasyarakatan	
9	RUTAN WEDA	24/20/2020	Divisi Pemasyarakatan	
10	RUTAN TERNATE	29/09/2020	Divisi Pemasyarakatan	

Data Anak Didik Pemasyarakatan yang Mendapatkan Pendidikan di Maluku Utara

NO	NAPITAH.ANAK	2019	2020
1	Jumlah total Napitah Anak di Maluku Utara	15	15

- **Realisasi Anggaran**

  Realisasi Anggaran pada Divisi Pemasyarakatan selama tahun 2020 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.889.924.000,-**	**Rp.889.924.000,-**	**Rp. 851,396,068**	**95.67 %**

Realisasi Anggaran Tahun 2020 Satker Pemasyarakatan

NO	KODE	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	649024	DITJEN PAS	889,924,000	851,396,068	95.67
2	652827	LAPAS TERNATE	7,166,484,000	6,758,586,651	94.31
3	109153	LAPAS SANANA	4,577,919,000	4,411,776,354	96.37
4	109152	LAPAS TOBELO	4,540,717,000	4,382,214,287	96.51
5	497840	LAPAS JAILOLO	2,853,943,000	2,744,375,338	96.16
6	407503	LAPAS LABUHA	3,179,067,000	2,895,672,076	91.09
7	418350	LAPAS PEREMPUAN	29,373,395,000	29,136,747,783	99.19
8	352614	LPKA TERNATE	3,363,844,000	3,228,639,631	95.98
9	632047	BAPAS TIDORE	1,000,226,000	953,851,000	95.36
10	626161	BAPAS TERNATE	2,699,969,000	2,545,541,058	94.28
11	531891	RUTAN SOASIO	3,664,067,000	3,530,482,269	96.35
12	684003	RUTAN WEDA	1,669,227,000	1,549,314,280	92.82
13	407499	RUTAN TERNATE	5,248,590,000	5,164,858,435	98.40
14	632712	RUPBASAN TERNATE	1,649,239,000	1,611,624,546	97.72
TOTAL			**70,986,687,000**	**68,913,683,708**	**97.08**

- **Analisa**

  Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk Divisi Pemasyarakatan selama Tahun 2020 adalah sebesar 90% dan telah terealisasi sebesar 95,67%.Hal tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020, sebagaimana berikut:

  1) Pembinaan Satuan tugas keamanan dan ketertiban;
  2) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan;
  3) Pemberian remisi;
  4) Koordinasi Dilkumjakpol;

5) Unit layanan Pengaduan;
6) Unit layanan Informasi;
7) Rapat kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Maluku Utara;
8) Konsultasi Teknis pemasyarakatan di bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi;
9) Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan, barang rampasan negara, keamanan;
10) Koordinasi Teknis pemasyarakatan di bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi;
11) Koordinasii Teknis Pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan, barang rampasan negara, keamanan;
12) Pencegahan dan Penindakan Kamtib;
13) Mutasi/ Pemindahan;
14) Monitoring & Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
15) Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak berhadapan dengan Hukum.

Dari data capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan yang juga merupakan capaian Satuan Kerja Pemasyarakatan di Maluku Utara, didapatkan analisa sebagai berikut. Berdasarkan hasil survey IKM yang dihimpun oleh Balitbangham menunjukkan bahwa indeks IKM yang diperoleh Kanwil Maluku Utara sebesar **7,7** artinya realisasi IKM telah tercapai melebihi target yg telah ditargetkan **(7,0).** Dengan IKM rata-rata sebesar 7,7 ini menunjukkan Layanan Pemasyarakatan masuk dalam kreteria " Baik" dan rata-rata pengguna layanan merasa Puas terhadap Layanan Pemasyarakatan.

Berdasarkan laporan pada tahun 2020 dari Unit PelaksanaTeknis Pemasyarakatan di Maluku Utara, Secara keseluruhan realisasi anggaran Satuan Kerja Pemasyarakatan masih pada batas aman yaitu sekitar 97.08%, meskipun beberapa kegiatan tertunda untuk dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19 saat ini dilakukan Refocusing Anggaran.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian pada tahun 2020, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki 2 (dua) indikator kinerja dengan 2 (dua) sasaran, yang termasuk dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Capaian kinerja Divisi Keimigrasian pada tahun 2020 terealisasi 100 %.

- BIDANG FASILITATIF:
  - Kegiatan Koordinasi Pengembangan SDM terkait Inpasing S1 dan ujian Dinas serta Koordinasi Administrasi Keuangan terkait Recofusing Akun Covid-19 pada Kanim Tobelo
- BIDANG TEKNIS:
  1. Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian

- Kegiatan Pendampingan Mobile Paspor Haji Kanim Ternate dan Kannim Tobelo di Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pendampingan Paspor Simpatik Kanim ternate dan Kanim Tobelo dihari libur sesuai Jadwal.
- Kegiatan Pendampingan Eazy Paspor Kanim Ternate di Kota Ternate.
- Kegiatan Koordinasi Layanan Eazy Paspor di Kemenag Kabupaten Halmahera Selatan.
- Kegiatan Pendampingan Mobile Asing Kanim Ternate di PT. MCC Kab. Taliabu
- Kegiatan Koordinasi Ke Dirlantaskim terkait Penetapan Terminal Khusus PT. IWIP
- Kegiatan Koordinasi ke PT.IWIP Kab.Halteng terkait Penetapan Terminal Khusus PT. Youshan Nickel Indonesia di Kawasan PT Industri Weda Bay Industrial Park sebagaiTempat Pemeriksaan Imigrasi

2. Intelijen dan penindakan Keimigrasian

- Kegiatan Koordinasi Intelijen ke Instansi Terkait di Kota Ternate
- Kegiatan Koordinasi Intelijen dan Penindakan di Kanim Ternate dan Kanim Tobelo
- Kegiatan Intelijen dalam Kota terkait Laporan Harian Intelijen dan KIRKA

PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN :

1. Koordinasi TIM PORA = 1 Kegaitan di Kota Ternate
2. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian = 11 LHI di Kota/Kab
3. Operasi Pengawasan = 8 Kegiatan di Kab/Kota
4. Operasi Pemantauan dan Pendataan =1 Keg di PT.IWIP Kab.Halteng
5. Sosialisasi Gakkum = 5 Kegiatan di Kab/kota
6. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian = tidak terdapat Pelanggaran

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi seperti: Kegiatan Bindalwasnis Bidang Fasilitatif/ Bidang Teknis dan Penyelenggaraan Penegakkan Hukum tidak semua dilaksanakan dikarenakan :

- Surat Edaran Sekjen Kemenkumham RI No : SEK - 02.OT.02.02 Tahun 2020 tgl 13 Maret 2020 Hal Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pada point (B) Menunda Perjalanan Dinas di luar dan di dalam negeri baik dalam kegiatan rapat/ pertemuan/ acara
- Surat Edaran Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang pembatasan pelayanan paspor selama masa pandemi Covid-19 - Surat Dirjenim Nomor : IMI.1-KU.01.03-2558 tanggal 26 Mei 2020 Hal Penyanpaian Surat Edaran

Maksimum Pencairan Tahap III TA 2020

- Surat Edaran Dirjenim Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatanan Normal Baru

Terkait adanya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara khususnya Divisi Keimigrasian, maka telah diambil langkah-langkah kebijakan diantaranya sebagai berikut:

a. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pusat;
b. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian, terutama dalam kerangka penguatan OA;
c. Terkait keterbatasan jumlah petugas di UPT Imigrasi maka secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berjenjang terhadap pelaksanaan tugas terhadap petugas di UPT Imigrasi;
d. Divisi Keimigrasian melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi terkait lainnya terkait Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) di Wilayah Maluku Utara
e. Mengirimkan Surat Edaran kepada UPT Imigrasi untuk meningkatkan ketertiban administratif serta peningkatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dan pelayanan Paspor
f. Pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
g. Penguatan Fungsi Fasilitatif dan Teknis Keimigrasian
h. Melakukan Refocusing Anggaran Covid 19

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Divisi Keimigrasian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7,3 Indeks	9,0 Indeks	123%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	100%

No	Satuan Kerja	Laporan Harian Intelijen
1	Divisi Keimigrasian	11 Laporan
2	Kanim Ternate	29 Laporan
3	Kanim Tobelo	12 Laporan
TOTAL		**52 Laporan**

NO	Satuan Kerja	Koordinasi TIM PORA
1	Divisi Keimigrasian	1 Kegiatan
2	Kanim Ternate	1 Kegiatan
3	Kanim Tobelo	2 Kegiatan
TOTAL		**4 Kegiatan**

NO	Satuan Kerja	Operasi Pengawasan
1	Divisi Keimigrasian	8 Kegiatan
2	Kanim Ternate	4 Kegiatan
3	Kanim Tobelo	7 Kegiatan
TOTAL		**19 Kegiatan**

No	Satuan Kerja	Operasi Pemantauan dan Pendataan
1	Divisi Keimigrasian	1 Kegiatan
2	Kanim Ternate	2 Kegiatan
3	Kanim Tobelo	2 Kegiatan
Total		**5 Kegiatan**

No	Satuan Kerja	Sosialisasi Gakkum
1	Divisi Keimigrasian	5 Kegiatan
2	Kanim Ternate	1 Kegiatan
3	Kanim Tobelo	2 Kegiatan
Total		**8 Kegiatan**

Data Hasil Survey IKM Balitbangham

NO.	SATUAN KERJA	BOBOT INDEKS (20 Kriteria)	KONVERSI BOBOT INDEKS (10 Kriteria)	PREDIKAT	MUTU
1	Kanim Ternate	**17**	**8,5**	**B**	**Baik**
2	Kanim Tobelo	**19,21**	**9,602**	**A**	**Sangat Baik**
RATA - RATA BOBOT INDEKS		**18,10**	**9,051**	**A**	**Sangat Baik**

Data Tindakan Keimigrasian 2019 – 2020

NO.	TINDAKAN	2019	2020
1	Tindakan Administrasi Keimigrasian	76	**88**
2	Pro justitia	1	**-**
Total		**77**	**88**

* persentase dihitung dari = selisih dibagi tindakan thn 2019 dikalikan 100%

Data Layanan Penerbitan Paspor 2019 – 2020

NO.	JENIS PASPOR	2019	2020
1	Paspor 48 Halaman	**4581**	**1912**
2	Paspor 48 Elektronik	-	-
3	Paspor 24 Halaman	-	-
Total		**4581**	**1912**

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2019 – 2020

NO.	IZIN TINGGAL	2019	2020
1	KITAS	**2845**	**1643**
2	KITAP		
3	ITK	**6483**	**6431**
Total		**9328**	**8074**

- **Realisasi**

  Realisasi Anggaran pada Divisi Keimigrasian TA. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.1,514,904,000,-**	**Rp. 1,514,904,000**	**Rp. 1,086,064,083**	**71.69 %**

Realisasi Anggaran Tahun 2020 Satker Keimigrasian

KODE	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
649025	Divisi Keimigrasian	Rp.1,514,904,000,-	Rp.1,086,064,083	**71.69 %**
480505	Kanim Ternate	Rp. 8.506.036.000,-	Rp.6,493,378,830	**76.34 %**
662968	Kanim Tobelo	Rp. 5.003.329.000,-	Rp.4,041,970,615	**80.79 %**
TOTAL		**Rp. 15,024,269,000**	**Rp.11,621,413,528**	**77.35 %**

- **Analisa**

  Hasil survey IKM oleh Balitbangham pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara menunjukkan seluruh Satuan Kerja Keimigrasian mendapatkan rata-rata indeks IKM sebesar 18,10 (dengan 20 kriteria penilaian) atau setara dengan nilai indeks 9,05 jika dikonversi ke dalam penilaian 10 kriteria. Nilai indeks tersebut memposisikan IKM Layanan Keimigrasian berada pada predikat “Sangat Baik”, atau dengan kata lain masyarakat “Sangat Puas” dengan kualitas Layanan Keimigrasian yang diberikan Satuan Kerja Keimigrasian. Data tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 77 Tindakan Administrasi Keimigrasian di tahun 2019 menjadi 1 pelanggaran tahun 2020. Penurunan pelanggaran ini merupakan akibat kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi WNA yang overstay di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Selain itu ditutupnya jalur penerbangan ke luar negeri akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyaknya WNA yang overstay. Melalui data realisasi anggaran Divisi Keimigrasian dan Satuan Kerja Keimigrasian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran pada tahun 2020 dinilai baik. Meskipun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020 mempunyai 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja dengan 8 (delapan) sasaran strategis dalam 6 (enam) program kerja, yaitu Administrasi Hukum Umum, Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Hukum, Pemajuan HAM, Pembinaan Hukum Nasional, serta Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Bidang Pelayanan Hukum

➢ Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menjalankan Program Administrasi Hukum Umum dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun 2020.

NO	LAPORAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL
1	Pelantikan Anggota MPWN dan MKNW Maluku Utara	Jakarta	30 Januari s/d 1 Februari 2020
2	Pelantikan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Ternate dan Pemda Provinsi Maluku Utara	Aula Imigrasi Ternate	20 Februari 2020
3	Koordinasi Instansi Terkait	Kota Tidore Kepulauan	26 s/d 27 Februari 2020
4	Layanan Advokasi	Kabupaten Halmahera Selatan	1 s/d 3 Maret 2020
5	Koordinasi MKNW ke MKNP	Jakarta	3 s/d 6 Maret 2020
6	Layanan Fidusia	Kabupaten Pulau Taliabu	18 s/d 21 Maret 2020
7	Rapat Koordinasi MPWN & MPDN Maluku Utara	Aulah Kanwil	6 Mei 2020
8	Sosialisasi Layanan Notariat Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	16 Juni 2020
9	Sosialisasi Layanan Notariat Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	18 Juni 2020
10	Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris	Aulah Kanwil	18 Juni 2020
11	Sosialisasi Layanan Fidusia Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	19 Juni 2020
12	Sosialisasi Layanan AHU Lainya Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	22 Juni 2020
13	Koordinasi MKNW Ke MKNP	Jakarta	22 s/d 24 Juni 2020
14	Sosialisasi Layanan AHU Lainya Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	26 Juni 2020
15	Sosialisasi Layanan AHU Lainya Melalui Media Cetak dan Elektronik	LPP RRI Ternate	30 Juni 2020
16	Sosialisasi Layanan AHU Lainya Melalui Media Cetak dan Elektronik	RRI Ternate	15 Juli 2020
17	Sosialisasi Layanan AHU Lainya Melalui Media Cetak dan Elektronik	RRI Ternate	16 Juli 2020
18	Sosialisasi Layanan Fidusia Melalui Media Cetak dan Elektronik	RRI Ternate	17 Juli 2020
19	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Timur	20 s/d 22 Juli 2020

NO	LAPORAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL
20	Koordinasi MKNW ke MKNP	Jakarta	27 s/d 30 Juli 2020
21	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Kepulauan Sula	4 s/d 7 Agustus 2020
22	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Selatan	24 s/d 26 Agustus 2020
23	Kegiatan Koordinasi MPWN Ke MPP	Jakarta	31 Agustus s/d 2 September 2020
24	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Tengah	7 s/d 9 September 2020
25	Rapat MPWN dan MPDN	Aula Kanwil	10 September 2020
26	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Utara	15 s/d 17 September 2020
27	Focus Group Disscusion Tentang Pedoman Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum	Room Halmahera Shid Bella Ternate	24 September 2020
28	Rapat Koordinasi MPW dan MPD Terkait Teknis Pengawasan Terhadap PMPJ Oleh Notaris Wilayah	Room Halmahera Shid Bella Ternate	25 September 2020
29	Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah/Beneficial Ownership	Room Halmahera Sahid Bella Ternate	26 September 2020
30	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Selatan	30 September s/d 2 Oktober 2020
31	Pelantikan Anggota MPDN Kota Ternate Masa Jabatan 2020 sampai dengan 2023	Aulah Kanwil	13 Oktober 2020
32	Pelantikan PPNS Balai Trasportasi Darat Wilayah Malut, Dinas Sosial, Dinas PU dan Penataruang	Aulah Kanwil	16 Oktober 2020
33	Kordinasi Instansi Pusat	Jakarta	18 s/d 21 Oktober 2020
34	Kordinasi Instansi Pusat	Jakarta	3 s/d 6 November 2020
35	Layanan Kewarganegaraan	Kabupaten Halmahera Utara	3 s/d 5 November 2020
36	Layanan Kewarganegaraan	Kabupaten Kepulauan Sula	11 s/d 14 November 2020
37	Layanan Kewarganegaraan	Kabupaten Halmahera Selatan	11 s/d 13 November 2020
38	Layanan Kewarganegaraan	Kabupaten Pulau Morotai	18 s/d 20 November 2020
39	Kordinasi Instansi Pusat	Jakarta	23 s/d 23 November 2020
40	Layanan Advokasi	Kota Tidore Kepulauan	1 s/d 2 Desember 2020
41	Koordinasi Instansi Terkait	Sofifi	3 s/d 4 Desember 2020
42	Koordinasi Instansi Terkait	Kabupaten Halmahera Barat	7 s/d 8 Desember 2020

NO	LAPORAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	TANGGAL
43	Layanan Advokasi	Kabupaten Kepulauan Sula	14 s/d 17 Desember 2020
44	Kordinasi Instansi Pusat	Sekretariat MKN Jakarta	15 s/d 18 Desember 2020
45	Kordinasi Instansi Pusat	Subdit Pewarganegaraan Jakarta	15 s/d 18 Desember 2020
46	Kordinasi Instansi Pusat	P2L AHU Jakarta	15 s/d 18 Desember 2020

- **Capaian Kinerja**

Sesuai Perencanaan Kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum selama tahun 2020, didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	3.0	3.0	**100 %**
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	92,29%	**115%**

Jumlah Layanan AHU Kantor Wilayah

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON (Org / Berkas)	JUMLAH YG DISELESAIKAN	PERSENTASE PENYELESAIAN (%)
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	Nihil	Nihil	Nihil
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Nihil	Nihil	Nihil
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	Nihil	Nihil	Nihil
4	Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia	Nihil	Nihil	Nihil
5	Permohonan Pendaftaran Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil
6	Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti	Nihil	Nihil	Nihil
7	Pengambilan Sumpah/Janji PPNS	21 PPNS	21 PPNS	100 %
TOTAL		21	21	100 %

- **Realisasi Anggaran**

  Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp 2.260.000.000**	**Rp 2.260.000.000**	**Rp. 1,719,973,079**	**76,11 %**

- **Analisa**

  Demi terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di kantor Wilayah yang efektif, Subbidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai rencana kerja yang disusun. Dan data capaian kinerja menunjukkan capaian sebagai berikut, pada Indikator Kinerja Presentasi Layanan Program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan, Program AHU pada Kantor Wilayah mencapai angka 76,11%. Meskipun nilai capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditentukan namun jika ditelusuri lebih lanjut kontribusi terbesar berasal dari penyelesaian layanan Subbidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah sebesar 92,29%, merupakan dampak dari berlakunya pembatasan berkumpul di wilayah Maluku Utara. Terbatasnya ruang gerak pemohon dan petugas mengakibatkan sebagian besar kegiatan tatap muka langsung tidak dapat terlaksanan. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, kegiatan paket meeting (sosialisasi layanan AHU dan Rakor Kenotriatan) menjadi prioritas kedua setelah Kegiatan untuk penanganan covid, sehingga menyebabkan penyerapan tidak sesuai dengan target yg telah direncanakan. Dengan Adanya kebijakan self blocking dari Ditjen AHU terkait belum pastinya pencairan Anggaran MP III dan MP IV maka yg perlu menjadi prioritas utama adalah pengeluaran rutin Penyelengaraan layanan AHU seperti misalnya: honorarium dan operasional MPW, MPD, MKN,biaya sewa, dan beberapa kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi substansi. Agar penyerapan tetap sesuai dengan target maka pencairan honorarium harus tepat waktu. Perjalanan dinas juga tetap dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi substansi, tetapi dengan tetap mempergunakan protokol kesehatan pencegahan covid-19 serta menggunakan media informasi elektronik.

➢ **Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Berikut adalah uraian kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun 2020.

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
	a. Penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual	- Halmahera Barat, 16-18 Februari 2020 - Univ. Muhammadiyah, Poltekkes Ternate, Komunitas Maluku Utara, 19 Februari 2020 - Tidore Kepulauan, 1 – 2 Maret 2020 - Jakarta, 4 – 6 Maret 2020 - Morotai, 9 - 11 Maret 2020 - Univ. Khairun, 25 Juni 2020 - Univ. Khairun dan IAIN Ternate, 26 Juni 2020 - Halmahera Timur, 19 – 21 Juli 2020 - Sula, 4 – 7 Agustus 2020 - Halmahera Selatan, 24 – 26 Agustus 2020 - Jakarta, 31 – 2 September 2020 - HalmaheraTengah, 7 – 9 September 2020 - Halmahera Utara, 15– 17 September 2020 - Jakarta, 4 – 6 November 2020 - Sula, 11 – 14 November 2020 - Sofifi, 3 – 4 Desember 2020	Melakukan koordinasi berkaitan dengan penyelesaian terhadap penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual pada seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara serta melaksanakan pendampingan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
	b. Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	- Ternate 16 Juni 2020 - Radio RRI KI Komunal 10 Juni 2020 12 Juni 2020 15 Juni 2020 - Radio RRI KI Lainnya 8 Juni 2020 11 Juni 2020 17 Juni 2020 20 Juni 2020 - Halmahera Selatan, 30 – 02 Oktober 2020 - Ternate, 29 September 2020	Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual baik Komunal maupun personal dengan para stakeholder dan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak dan elektronik.
2	Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah		
	a. Pencegahan pelanggaran KI di wilayah	-Polda Maluku Utara 13 Februari 2020 -Ternate, 2 Desember 2020	Melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual, menginventarisasi data pelanggaran terkini serta berbagai potensi yang ada untuk dapat

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
			diantisipasi dan bersinergi dengan instansi/ lembaga lain.
	b. Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran KI di Wilayah	- Morotai, 18 – 20 November 2020 - Pengawasan Pelanggaran Polda Ternate, 26 November 2020	Melakukan pendampingan berkaitan dengan penanganan aduan berkaitan dengan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada suatu wilayah, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang ada.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intektual melalui Kantor Wilayah	50 Jumlah Permohonan	123 Jumlah Permohonan	**246 %**
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	46 Stakeholder	**153 %**
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pecegahan pelanggaran kekayaaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	**100 %**

Rekapitulasi Mou Perjanjian Kerja Sama dan Pendampingan Kepada Pemda, Universitas dan Komunitas

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH YG DISELESAIKAN
1	Merek	**47**	**47**
2	Paten	**-**	**-**
3	Desain Industri	**-**	**-**
4	Hak Cipta	**106**	**106**

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH YG DISELESAIKAN
5	Mou	**11**	**11**
6	PKS	**24**	**24**
7	Indikasi Geografis	**2**	**2**
8	KI Komunal	**291**	**291**
Total		**481**	**481**

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

NO	INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TENTANG
1	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Khairun Ternate	2020	W.29.KI.09.01-1139 267/UN44.L1/KS.01 /2020	Peningkatan Pelaksanaan Ki
2	Institut Agama Islam Negeri Ternate	2020	W.29.KI.09.01-1137 138/In-16/HM-01/02/2020	Peningkatan Pelaksanaan Ki
3	Universitas Muhammadiyah Ternate	2020	W.29.KI.09.01-1141 01/MOU/R-UMMU/III/2020	Peningkatan Pelaksanaan Ki
4	Poltekkes Ternate	2020	W.29.KI.09.01-1143 HK.03.01/1/0630/20 20	Peningkatan Pelaksanaan Ki
5	Lembaga Seni Budaya Moloku Kieraha	2020	W.29.KI.09.01-1142	Peningkatan Pelaksanaan Ki
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan	2020	W.29.KI.09.01-3469 420/958/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halsel
7	Dinas Pertanian Kab. Halmahera Selatan	2020	W.29.KI.09.01.3470	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halsel
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kab. Halmahera Selatan	2020	W.29.KI.09.01-3471 530/349/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halsel
9	Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan	2020	W.29.KI.09.01-2946	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kota Tidore Kepulauan
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kota Tidore Kepulauan	2020	W.29.KI.09.01-2947 520/209/27/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui

NO	INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TENTANG
				Pemanfaatan Ki Di Kota Tidore Kepulauan
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan	2020	W.29.KI.09.01-2948	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kota Tidore Kepulauan
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kab. Halmahera Timur	2020	W.29.KI.09.01-2762 530/142/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Haltim
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Halmahera Timur	2020	W.29.KI.09.01-2763 430/49/DISPARBU D HT/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Haltim
14	Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai	2020	W.29.KI.09.01-1156	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Sula	2020	W.29.KI.09.01-3910 430/40/DISPARBU D.KS/XI/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Kepulauan Sula
16	Dinas Koperasi Dan Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kepulauan Sula	2020	W.29.KI.09.01-3912 518.530.510/192/DI SKOPERINDAG/KS /XI/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Kepulauan Sula
17	Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Sula	2020	W.29.KI.09.01-3911 520/270/Pert/XI/202 0	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Kepulauan Sula
18	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai	2020	W.29.KI.09.01-3992	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Pulau Morotai
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kab. Pulau Morotai	2020	W.29.KI.09.01-3993 530/400/XI/2020	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Pulau Morotai
20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pulau Morotai	2020	W.29.KI.09.01-3994 520/278/DPKP/202 0	Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Pulau Morotai

NO	INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TENTANG
21	Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	2020		Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halbar
22	Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat	2020		Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halbar
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kab. Halmahera Barat	2020		Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halbar
24	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	2020		Pengembangan Potensi Industri Dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ki Di Kab. Halbar

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

NO	INSTANSI	TAHUN	NOMOR
I	II	III	IV
1	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara	2020	W.29.IT.04.02-1140 01/MOU/R-UMMU/III/2020
2	Universitas Khairun Ternate	2020	W.29.IT.04.02-1138 267/UN44/KS.01/2020
3	Institut Agama Islam Negeri Ternate	2020	W.29.IT.04.02-1136 137/In-16/HM-01/02/2020
4	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	2020	W.29.TI.04.02-1182 03/490/180/HT/2020
5	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	2020	W.29.TI.04.02-3468 180/2296/2020
6	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	2020	W.29.TI.04.02-3909 180.7/23/KS/XI/2020
7	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	2020	W.29.TI.04.02-3991 180/32/MoU/PM/2020
8	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2020	W.29.TI.01.02-1134 34/KB/01.1/2020
9	Pemerintah Daerah Kota Ternate	2020	W.29.TI.04.02-1135 180/20/SETDA
10	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2020	W.29.TI.04.02-4203 120.22/2354/MU/2020
11	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	2020	W.29.TI.04.02-198/795/HB/2020

- **Realisasi Anggaran**

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.504,732,000**	**Rp. 504,732,000**	**Rp. 485,051,527**	**96.10 %**

- **Analisa**

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun. Selama periode tahun 2020, Program KI telah menyelesaikan 481 berkas permohonan KI, jumlah ini merupakan akumulasi dari permohonan merek, paten, desain industri, dan cipta. Saat ini target sudah berhasil terlampaui sebanyak 481 permohonan yang berasal dari permohonan yang diajukan melalui Kantor Wilayah maupun melalui Sentra Kekayaan Intelektual yang terdapat pada Perguruan Tinggi di Maluku Utara, meskipun demikian Program KI tetap terus berusaha untuk dapat memenuhi target bahkan melebihi target pada akhir tahun nanti.

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI secara tatap muka dibatasi. Hal ini menyebabkan jumlah cakupan stakeholder kurang dari target yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan diseminasi dan promosi KI dilaksanakan melalui kegiatan talkshow yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate. Meskipun sulit untuk menghitung jumlah stakeholder yang dapat diedukasi dari kegiatan talkshow radio, namun kami beramsumsi jumlah stakeholder merupakan akumulasi dari pemerintah daerah dan pelaku usaha di masing-masing wilayah yang masuk dalam jangkauan siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan pelaku usaha.

Untuk dapat memenuhi target pada tahun 2020 dilaksanakan diseminasi dan promosi KI dalam bentuk talkshow melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate yang memiliki jangkauan siaran lebih luas. Dan diharapkan melalui kegiatan ini Program KI dapat memenuhi bahkan melebihi target stakeholder yang telah ditetapkan. Kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah Maluku Utara diselenggarakan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) dengan melibatkan aparat penegak hukum dari Kepolisian Daerah Maluku Utara. Kegiatan FGD membahas mengenai penyusunan draft peta wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran kekayaan Intelektual.

Dilihat dari data penyerapan anggaran pada tahun 2020, penyerapan anggaran Program KI sesuai rencana disbursement plan, walaupun ada beberapa kendal dalam Hal ini merupakan akibat dari dampak pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pelarangan berkumpul di sebagian besar wilayah Maluku Utara, sehingga kegiatan pelayanan langsung dan kegiatan diseminasi promosi secara tatap muka ditunda untuk sementara waktu. Melihat kondisi tersebut Direktorat Jenderal KI menerbitkan postur anggaran baru yang memungkinkan perubahan bentuk pelayanan dan kegiatan diseminasi promosi KI. Dengan terbitnya perubahan postur anggaran tersebut, pelayanan langsung Program KI telah dibuka kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dan pelaksanaan kegiatan diseminasi promosi KI dapat dilaksanakan melalui media elektronik yaitu dalam bentuk talkshow radio atau televisi. Namun demikian, secara akumulasi penyerapan anggaran Program KI telah mencapai target penyerapan di tahun 2020, Program KI telah Melaksanakan kegiatan talkshow melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate dan desiminasi secara daring.

B. Bidang Hak Asasi Manusia

➢ Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM menjalankan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun anggaran 2020:

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	**Layanan Penelitian dan Pegembangan**		
	a. Pengkajian Hukum dan HAM di Wilayah	Tobelo, 16 Maret 2020	Kajian Implementasi Kemernterian Hukum dan HAM Corporate University : Studi Tentang Pengelolaan Pengetahuan di Tingkat Wilayah
	b. Pengembangan hasil Penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Ternate, 26 Agustus 2020	Kajian Penigkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM)

- **Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60 %	**100%**
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	**100 %**

Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR KINERJA	MATERI/BAHAN PENELITIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rekomendasi hasil kajian di wilayah	Implementasi Kemenkumham Corpu	**1**	**1**	**100 %**
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Indeks IPK dan IKM	**1**	**1**	**100%**
Total		**2**	**2**	**100%**

- **Realisasi Anggaran**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.70,048,000**	**Rp. 70,048,000**	**Rp. 68,226,000**	**97.40 %**

- **Analisa**

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Penelitian dan Pengembangan HAM Memiliki 2 indikator Kinerja. Indikator pertama terkait recomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian pengembangan hukum dan HAM telah terpenuhi,namun dalam pelaksanaan Kegitan pengambilan data pada tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnyaa. Karna saat ini masih dalam masa pandemini COVID 19, pengumpulan data di lakukan dengan memanfaatkan media online seperti video Call, kirim email, dan beberapa kesempatan juga langsung ke lapangan. Hal ini merupakan upaya agar kegitan dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah di tetapkan sebelumnya dapat terlaksana dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID 19.

Sesuai dengan ketentuan Balitbang HAM Pusat bahwa pada tahun ini Maluku Utara di target untuk dapat menyelesaikan 2 hasil rekomendasi dengan materi atau bahan Penelitian dengan tema 'Implementasi kemenkumham Corpu " dan "Peningkatan kualitas Pelayanan Publik berbasis Indeks IPK dan IKM " kedua hasil rekomendasi penelitian telah tercapai dan telah disampaikan kepada Balitbangham Pusat pada tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan target pada Indikator kenerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu sosialisasi Hasil Peneletian dan pengembangan Hukum dan HAM. Adapun perbandingan data realisasi anggaran yang di peroleh dari aplikasi SPAN) pada tahun anggaran 2020 sebesar 97.40%.

- **Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia menjalankan Program Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun anggaran 2020

NO.	KEGIATAN	TEMPAT / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	**Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah**		
	a. Pelayanan Komunikasi Masyarakat	_	Revisi Covid_19
	b. Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Jakarta 25/11/2020	Koodinasi ke Dirjen HAM dan Balitbang KUMHAM terkait program kegiatan anggaran
	c. Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwi	Ternate 15/09/2020	Kegiatan di laksanakan di aula Kantor Wilayah menghadirkan narasumber dari Unkhair dan Dirjen HAM
	d. Data Pemajuan HAM di Wilayah	Ternate 05/10/2020	RDK pengolahan data HAM yang masuk di dalamnya adalah : data aksi HAM, data Kabupaten Kota peduli ham dan data UPT berbasis HAM untuk di jadikan masing masing laporan
2	**Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah**		
	a. Aksi HAM Pemerintah Daerah	Ternate 8/06/2020	Kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten /kota untuk persiapan data dukung laporan Aksi HAM Daerah
	b. Kab/Kota Peduli HAM	Ternate 20/02/2020	Kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten /kota untuk persiapan data dukung laporan Kabupaten Kota Peduli HAM

	c. Diseminasi HAM di Wilayah	Weda 27/07/2020	Pelaksanaan penguatan petugas dalam implementasi pelayanan publik berbasis (PLHAM) di UPT melalui kegiatan discriminasi HAM

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	10 Instansi Pemerintah	500%
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	100%
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklajuti hasil Desiminasi dan Penguatan HAM dalm bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Rutan Weda	100%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

- **Realisasi Anggaran**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Pemajuan Hak Asasi Manusia selama tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.277,061,000**	**Rp. 277,061,000**	**Rp. 252,569,000**	**91.16 %**

- **Analisa**

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pemajuan HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan guna memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pertama yaitu jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM telah diperoleh 1 rekomendasi setelah melaksankan Rapat Koordinasi

Pelayanan Komunikasi Masyarakat untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Indikator kedua, Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebanyak 10 Pemda. Jumlah realisasi tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan Untuk indikator terakhir terkait tindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM telah dilaksanakan di salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, yaitu Rumah Tahanan klas IIB Weda serta Pelayanan Publik Berbasis HAM telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran UPT semaluku Utara walaupun belum mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM.

C. Bidang Hukum

➢ Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum menjalankan Program Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun anggaran 2020.

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Bankum / Penandatanganan Kontrak	16 Januari 2020	Aula Kantor Wilayah
2	Koordinasi JDIH	27 Januari 2020 29 Januari 2020 30 Januari 2020	Kota Tidore Kepulauan Sofifi Kota Ternate
3	Koordinasi Pusat (Kegiatan Bimtek Aplikasi/Integrasi JDIH di BPHN)	23 s/d 25 Februari 2020	BPHN Jakarta
4	Bimtek JDIH	3 Maret 2020	Aula Kantor Wilayah
5	Ceramah Penyuluhan Hukum Kec. Kota Ternate Tengah	23 Juli 2020	Aula Kantor Camat Tengah
6	Ceramah Penyuluhan Hukum Kec. Kota Ternate Pulau	24 Juli 2020	Aula Kantor Camat Pulau
7	Ceramah Penyuluhan Hukum Kec. Kota Ternate Barat	29 Juli 2020	Aula Kantor Camat Barat
8	Ceramah Penyuluhan Hukum Kec. Kota Ternate Selatan	19 Agustus 2020	Aula Kantor Camat Selatan
9	Monitoring dan Evaluasi OBH Kab. Kepulauan Sula	2 s/d 4 September 2020	Kabupaten Kepulauan Sula
10	Evaluasi/Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	2 s/d 4 September 2020	Kabupaten Kepulauan Sula
11	Monitoring dan Evaluasi OBH Kota Tidore Kepulauan	7 September 2020	Kota Tidore Kepulauan
12	Monitoring dan Evaluasi OBH Kota Ternate Tim-I	8 September 2020 9 September 2020	Kota Ternate

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
13	Penyuluhan Hukum Keliling Kel. Salero	3 Oktober 2020	Kelurahan Salero
14	Penyuluhan Hukum Keliling Kel. Takome	4 Oktober 2020	Kelurahan Takome (Jikomalamo)
15	Penyuluhan Hukum Keliling Kel. Gamalama	5 Oktober 2020 6 Oktober 2020	- Kelurahan Gamalama (Taman Nukila) - Kelurahan Gamalama (Front Oranje)
16	Evaluasi/Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	7 s/d 9 Oktober 2020	Kabupaten Halmahera Utara
17	Penyuluhan Hukum Keliling Kel. Gamalama	12 Oktober 2020	Kelurahan Gamalama(Sekitaran Pasar Gamalama)
18	Penyuluhan Hukum Keliling Pasar Dufa-Dufa	13 Oktober 2020	Pasar Dufa-Dufa
19	Koordinasi Pusat (JDIH) ke Jakarta		BPHN Jakarta
20	Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu Kec. Ternate Utara	15 Oktober 2020	Kecamatan Ternate Utara
21	Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu Kec. Pulau Hiri	16 Oktober 2020	Kecamatan Pulau Hiri

- **Capaian Kinerja**

  Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	1. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	63 Orang	140 Orang	**222 %**
		2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	13 Kegiatan	**185 %**
		3. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
		4. Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
		5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
		6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**

- **Realisasi Anggaran**

  Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN realisasi anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional selama tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.910,371,000**	**Rp. 910,371,000**	**Rp. 903,536,000**	**99.25 %**

- **Analisa**

  Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan data capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional selama tahun anggaran 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 140 masyarakat miskin telah memperoleh bantuan hukum litigasi dan telah terlaksana 13 kegiatan non litigasi kepada masyarakat miskin serta telah terselenggara pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Sebagian besar indikator kinerja tersebut telah terlaksana dengan baik, kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan layanan informasi hukum melalui sistem JDIH dengan presentase capaian kinerja sebesar 100%, karena telah melaksanakan layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN dalam kantor wilayah, dengan melaksanakan kegiatan peng-update-tan data melalui aplikasi ILDIS, melaksanakan koordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten di wilayah Maluku Utara dan koordinasi dengan JDIHN secara virtual untuk pertama kalinya.

  Terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan disebabkan oleh pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 sehingga program kerja yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meski demikian, terdapat beberapa kegiatan yang dapat tetap terlaksana walaupun di masa pandemi COVID-19 dengan mengalihkan kegiatan secara virtual yang memanfaatkan media online sehingga lebih efisien dalam hal waktu pelaksanaannya. Kemudian jika dilihat dari segi keuangan, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 telah terserap keseluruhan sesuai dengan perencanaan penyerapan anggaran sebesar 99.25%.

➢ **Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah**

  Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menjalankan Program Pembentukan Hukum dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja yang dibuat antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah uraian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama tahun anggaran 2020:

- Terlaksananya harmonisasi produk hukum daerah 7 kab/kota yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kab.Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Selatan,Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai dan Provinsi Maluku Utara.
- Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Harmonisasi perancangan peraturan daerah;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memberikan kontribusi positif terkait dengan program pembentukan Perda Di Maluku Utara.

No	NAMA RANPERDA	Kab/Kota
1	Pemanfaatan Tanah Kosong pedoman Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Pulau Morotai
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula	Kepulauan Sula
3	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil	Halmahera Tengah
4	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Halmahera Tengah
5	Retribusi Terminal	Halmahera Tengah
6	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Halmahera Tengah
7	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan	Halmahera Tengah
8	Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Halmahera Utara
9	Pengelolaan Zakat	Kota Tidore
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pdam Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
11	Cagar Budaya	Prov.Maluku Utara

Tabel Nama – Nama Perancang Perundang-undangan di Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020

NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
EKI INDRA WIJAYA, S.H.,M.H	198211082009011004	PENATA (III/c)	PERANCANG MUDA
RUSMAN PATTIWAEL, S.H.,M.H	198710272009121003	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
BUDI RAHMAN, S.H	198411192009121004	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
SUKARTO ABUBAKAR, S.H	198306242009011003	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
SULASTRI UDIN, S.H	198410302009012005	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA

NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
JUNAIDI AHMAD, S.H	197892142009121002	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
JULIA KARIM, S.H	198107222009012004	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
SILFIAH H. MANUFURI, S.H	198409302010122004	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
ISMAR ADUN, S.H	198405032009121004	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
ULFA SEBAN, S.H	198703162010122003	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA
ASRUL SANI BAHAR, S.H	198102042010121001	PENATA MUDA TK I (III/b)	PERANCANG PERTAMA

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki Perancang Perundang-undangan sebanyak 11 orang pegawai. Adapun rinciannya adala Perancang Muda 1 orang dan Perancang Pertama 10 orang.

- **Capaian Kinerja**

  Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Program Pembentukan Hukum sebagai berikut

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Perda	11 Perda	110 %
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah perancang peraturan perundangan-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	11 Orang	91,7 %

- **Realisasi Anggaran**

  Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran Program Pembentukan Hukum selama kurun tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Capaian %
Jumlah Anggaran	**Rp.152,448,000**	**Rp. 152,448,000**	**Rp. 151,129,500**	**99.14 %**

- **Analisa**

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pembentukan Hukum menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja di tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan sebanyak 11 Raperda dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Raperda, artinya realisasi kinerja indikator rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi ini telah melampaui taget dengan presentase capaian sebesar 110%. Sedangkan indikator kinerja yang kedua yaitu perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 11 Orang, karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Berdasarkan data realisasi anggaran yang diperoleh dari aplikasi SPAN menunjukkan pada pada tahun 2020 terdapat sebesar 99,14%. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dikarenakan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka dan mengumpulkan banyak orang harus dialihkan menjadi pertemuan secara daring dengan memaksimalkan koordinasi melalui media online. Dengan demikian, kegiatan dalam rangka memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tetap terlaksana walaupun di masa pandemi COVID-19.

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2020

Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku Utara, dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan sebagaimana pada perjanjian kinerja telah tercapai, bahkan beberapa indikator kinerja memperoleh realisasi yang melebihi target, seperti indikator jumlah rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan, jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi, terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah, serta beberapa indikator pada sasaran Terciptanya Layanan Kekayaan Intelektual di kantor Wilayah Maluku Utara yang berkualitas baik sekali.

Selain itu, sebagai hasil dari kegiatan kerja Divisi Pelayanan Hukum khususnya Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2020 yang telah mengumpulkan koleksi buku, sehingga jumlah peminat dari berbagai kalangan yang meminjam buku pada perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang terus meningkat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020, juga dilakukan pengawasan serta pengendalian internal sebagaimana berikut:

a. Melaksanakan Forum Pendalaman Materi Perancang untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, keterampilan, serta sikap Perancang Kanwil;

b. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk meningkatkan Pengetahuan dan wawasan, Keterampilan, serta Sikap Perancang Kanwil dan Pemda;

c. Melaksanakan kegiatan penilaian angka kredit perancang untuk meningkatkan kompetensi perancang kanwil;

d. Melakukan koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Prov/Kab/Kota;

e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sehingga pelaksanaan Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dapat lebih optimal;

f. Melakukan mediasi dan konsultasi peraturan daerah/rancangan perda;

g. Mensosialisasikan Kebijakan Legislasi di Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum nasional;

h. Melaksanakan monitoring dan kajian perda;

i. Pelaksanakan harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah;

j. Melaksanakan Koordinasi dengan Pusat Jaringan di Provinsi dan anggota Jaringan di Kabupaten / Kota secara berkala;

k. Melakukan monitoring terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;

l. Melakukan kerjasama dengan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi;

m. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, sekolah sadar hukum, pemberian bantuan hukum dan pengelolaan JDIH;

n. Melakukan koordinasi dengan OBH terkait penyerapan anggaran dan pengelolaan aplikasi sidbankum.

o. Tingkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Lantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara Menjadi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (NKNW)

p. Pelaksanaan Kegiatan Kajian Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada UPT Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Malut Gelar Sosialisasi Riset Operasional Efektivitas Rehabilitasi Narkotika

q. Permudah Akses Layanan Pengaduan HAM, Kanwil Kemenkumham Malut Gelar Pengukuhan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat

r. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Pengawas Daerah

s. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah, Kanwil Kemenkumham Malut

t. Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris

u. Kegiatan Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

v. Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Semester II Tahun Anggaran 2020

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Bidang Hukum tahun 2020 terdapat pula hambatan-hambatan pada proses pemenuhan capaian kinerja antara lain:

1) Belum optimalnya jumlah Pemerintahan Daerah yang mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah;
2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, yang berdampak pada jumlah desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Maluku Utara masih sangat sedikit;
3) Ada beberapa OBH yang penyerapan anggarannya tidak maksimal sehingga perlu dilakukan Revisi Anggaran;
4) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai Pusat Layanan Hukum belum optimal.
5) Masih ada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota atau DPRD Prov/Kab/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6) Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hukum pada masyarakat;
7) Penggunaan aplikasi Sidbankum oleh OBH masih belum optimal;
8) Belum adanya SDM yang mempunyai keterampilan di bidang JDIH dan kurangnya sarana dan prasarana serta aplikasi yang sering berubah.

Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Salah satu tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai sarana informasi terkait capaian kinerja organisasi, untuk itu perlu disajikan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembanding capaian kinerja tahun berjalan. Berikut capaian kinerja terkait pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran Satuan Kerjanya.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NO	PROGRAM	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	7.1 Indeks	7.1 Indeks	100%	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	7,1 Indeks	9,3 Indeks dg 10 kriteria (18,67 dg 20 kriteria penilaian)	**130,98 %**
			Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	70 Nilai	70 Nilai	100%		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85 Nilai RB	78,22 Nilai RB	**92,02 %**
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	90 Nilai	90 Nilai	100%		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85 Nilai LKIP	85 Nilai LKIP	**100%**
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakata	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Maluku Utara	90%	90%	100%	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan perlakuan Pelanggar Hukum yang berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	90%	**100%**
		Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Presentase Mantan Narapidana/ Anak yang berhasil di Maluku Utara	30%	30%	100%	Terlaksananya Supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar.	90%	90%	**100%**
		Meningkatnya ketaatan hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunya Presentase Residivis Maluku Utara	10%	10%	100%	Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang berdaya Guna.	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersetifikat.	90%	90%	**100%**
		Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran	Presentase Basan Baran Yang Dikelola Sesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang taat hukum	Menurunnya Presentase Residivis	1%	1%	**100%**
			Presentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar	90%	90%	100%	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	90%	90%	**100%**

NO	PROGRAM	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
			Maluku Utara								
			Presentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%					
			Presentase Anak yang mendapatkan pembinaan Sesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%					
			Presentase anak yang mendapatkan Kemasyarakatan Dan Pengetasan Anak Sesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%					
			Presentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan PengawasanSesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%					
			Presentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai dengan Standar Maluku Utara	90%	90%	100%					
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	11.400	67.897	100%	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7,3 Indeks	9,0 Indeks	**123%**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	7,3	100%	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	**100%**
		Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	77	35	45 %					
4	Program Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum Umum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia,notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	3.0	3.0	**100%**

NO	PROGRAM	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
							di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	80%	**100%**
5	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Maluku Utara yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Maluku Utara	80 %	80 %	100 %	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intektual melalui Kantor Wilayah	50 Jumlah Permohonan	123 Jumlah Permohonan	**246%**
			Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Maluku Utara	80 %	80 %	100 %		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	46 Stakeholder	**153%**
			Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Maluku Utara	80 %	80 %	100 %		Jumlah pelaksanaan kegiatan pecegahan pelanggaran kekayaaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	**100%**
			Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Maluku Utara	80%	80%	100 %					
6	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Termanfaatkanya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	20%	38%	190%	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentasi rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60%	**100 %**
		Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 buku	1 buku	100 %		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di sosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	**100 %**
7	Program Pemajuan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Pemda	9 Pemda	225 %	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	10 Instansi Pemerintah	**500%**
			Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Pemda	5 Pemda	167 %		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kota Ternate	**100%**
		Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 Layanan	1	100 %		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklajuti hasil			

NO	PROGRAM	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
								Desiminasi dan Penguatan HAM dalm bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Rutan Weda	**100%**
							Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	**100%**
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	Terselenggaranya pembinaan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah. Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum itigasi	105 Org	162	154 %	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi	63 Orang	140 Orang	**222 %**
			Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ kelompok masyarakat miskin	14	28	200 %		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	13 Kegiatan	**185 %**
			Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diwilayah	1 Daerah	3 Daerah	300 %		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
			Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Daerah	2 Daerah	200 %		Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
			Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	6 Daerah	600 %		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
			Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sesuai JDIHN	1 Daerah	4 Daerah	400 %		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	**100 %**
			Pelatihan/ peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 peserta	50 Peserta	100 %					
9	Program Pembentukan Hukum	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Presentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80 %	80 %	100%	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Perda	11 Perda	**110 %**
			Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan subtansi perancangan peraturan daerah	35 Orang	11 Orang	31 %	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah perancang peraturan perundangan-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	11 Orang	**90 %**

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NO	KODE SATKER	SATKER	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	649022	SEKJEN	9,106,469,000	9,065,914,906	**99,55**	10,244,495,000	10,058,215,669	**98.18%**
2	649023	DITJEN AHU	1,900,000,000	1,853,221,987	**97,54**	2,260,000,000	1,719,973,079	**76.11%**
3	649024	DITJEN PAS	781,204,000	766.752.656	**98,15**	889,924,000	851,396,068	**95.67%**
4	649025	DITJEN IMIGRASI	846,494,000	841.794.475	**99,44**	1,514,904,000	1,086,064,083	**71.69%**
5	649026	DITJEN KI	167,014,000	167,014,000	**100,00**	504,732,000	485,051,527	**96.10%**
6	649027	DITJEN PP	182,050,000	181,346,470	**99,61**	152,448,000	151,129,500	**99.14%**
7	649028	DITJEN HAM	277,061,000	277.061.000	**99,45**	277,061,000	252,569,000	**91.16%**
8	649029	BPHN	993,811,000	982,493,000	**98,86**	910,371,000	903536000	**99.25%**
9	649030	BALITBANGKUMHAM	43.600.000	43.600.000	**100**	70,048,000	68,226,000	**97.40%**
10	652827	LAPAS TERNATE	6,296,009,000	6,268,537,384	**99.56**	7,166,484,000	6,758,586,651	**94.31%**
11	109153	LAPAS SANANA	4,273,854,000	4,216,762,189	**98.66**	4,577,919,000	4,411,776,354	**96.37%**
12	109152	LAPAS TOBELO	4,600,343,000	4,572,211,642	**99.39**	4,540,717,000	4,382,214,287	**96.51%**
13	497840	LAPAS JAILOLO	2,869,443,000	2,862,254,959	**99.75**	2,853,943,000	2,744,375,338	**96.16%**
14	407503	LAPAS LABUHA	3,272,489,000	3,251,738,727	**99.37**	3,179,067,000	2,895,672,076	**91.09%**
15	407499	RUTAN TERNATE	5,288,655,000	5,288,582,260	**100.00**	5,248,590,000	5,164,858,435	**98.40%**
16	531891	RUTAN SOASIO	3,231,104,000	3,206,770,205	**99.25**	3,664,067,000	3,530,482,269	**96.35%**
17	684003	RUTAN WEDA	1,615,878,000	1,568,058,878	**97.04**	1,669,227,000	1,549,314,280	**92.82%**
18	418350	LAPAS PEREMPUAN	3,592,108,000	3,527,118,585	**98.19**	29,373,395,000	29136747783	**99.19%**
19	352614	LPKA TERNATE	3,221,079,000	3,112,831,786	**96.64**	3,363,844,000	3,228,639,631	**95.98%**
20	632712	RUPBASAN TERNATE	1,482,427,000	1,474,793,533	**99.49**	1,649,239,000	1,611,624,546	**97.72%**
21	626161	BAPAS TERNATE	2,498,609,000	2,418,646,547	**96.80**	2,699,969,000	2,545,541,058	**94.28%**
22	632047	BAPAS TIDORE	-	-	**-**	1,000,226,000	953,851,000	**95.36%**
23	480505	KANIM TERNATE	6,268,336,000	6,118,670,731	**97.61**	8,506,036,000	6,493,378,830	**76.34%**
24	662968	KANIM TOBELO	3,674,880,000	3,512,477,251	**95.58**	5,003,329,000	4,041,970,615	**80.79%**
TOTAL			**66,482,917,000**	**65,577,132,771**	**98.64 %**	**101,320,035,000**	**95,025,194,079**	**93.79%**

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara tahun 2020 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja.

a. Tersedianya jumlah aparatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja;
b. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya yang baik;
c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing-masing unit/bidang/Divisi;
d. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan antor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara disusun dan dituangkan dengan didasarkan pada memfokuskan tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektitas koordinasi dan kerjasama dengan *stake holder* yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam mendukung setiap program dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2020, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melaksanakan 9 (Sembilan) DIPA inline dengan 9 unit eselon I terkait. Secara umum dari hasil analisis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara terhadap program/kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan, baik dalam konteks realisasi anggaran dan kegiatan, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncakanan dan ditargetkan. Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja jajaran program/kegiatan penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja tahun 2020, Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dengan dasar PP No. 46/2011, baik secara online dan manual sampai dengan laporan ini disusun jumlah pegawai yang tercatat dalam *data base* Kantor Wilayah beserta jajaran berjumlah 717 orang.
b. Pelaksanaan absensi pegawai dengan menggunakan absensi secara online yang dilaksanakan setiap pagi dan sore hari setelah apel. Dengan demikian, pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang sah akan langsung terdeteksi.
c. Pada Tahun 2020 ini, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI, termasuk seluruh jajaran Kantor Wilayah telah menerima tunjangan kinerja, hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam hal peningkatan kinerja dan semangat pegawai dalam melaksanakan tugas.
d. Olah raga senantiasa dilaksanakan pada Kantor Wilayah, dengan melaksanakan senam setiap hari Jum'at yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai.
e. Dalam rangka penilaian Zona Integritas, kantor wilayah melaksanakan jumat bersih baik dalam ruang kerja maupun seputaran kantor.
f. Dalam hal kesehatan, Kantor Wilayah melaksanakan program kesehatan dengan memberikan obat/suplemen, masker kepada pegawai dalam pencegahan dan penanggulangan Corona Virus.
g. Dalam rangka mendukung pekerjaan agar berjalan dengan baik, Kantor Wilayah melaksanaan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pada tahun 2020.
h. Dalam rangka keseragaman berpakaian, kantor wilayah melaksanakan pengadaan pakaian dinas untuk pegawai dan PPNPN.
i. Dalam rangka mendukung pencegahan dan penanggulangan covid 19 seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah demi mencegah terjadinya penularan virus Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2020 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024. Bab III menunjukkan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2020. Serapan anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada beberapa program masih mengalami deviasi negatif dan penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 93,79%. Adapun deviasi negatif pada realisasi anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah ditetapkan, beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda karena kondisi pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di wilayah Maluku Utara. Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah ditetapkan, terutama kegiatan rapat koordinasi yang mengumpulkan banyak orang dan perjalanan dinas monitoring/evaluasi. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di wilayah Maluku Utara.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di lingakungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Utara serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.

3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
4. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara:

1. Perlu adanya peningkatan atau penambahan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk memaksimalkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu kiranya menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Rapat koordinasi yang mengumpulkan banyak orang sedapat mungkin dilaksanakan melalui media teleconference (aplikasi Zoom). Kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan Satuan Kerja dilaksanakan melalui pengisian aplikasi kinerja ataupun pengiriman berkas melalui email. Jika kegiatan rapat koordinasi yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dihindarkan. Maka pelaksanaannya harus dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

3. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya;

4. Mengoptimalkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik manusia maupun dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Maluku Utara dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ternate, 31 Desember 2020
Kepala Kantor Wilayah

Husni Thamrin
Nip. 19610901 198503 1 019

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Adrian Kriswanto, S.E.,M.Si.
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Ramli. HS, S.E.,M.A.P.	Rifqi Adrian Kriswanto, S.E.,M.Si.
NIP. 196003091985031001	NIP. 197204291998031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Indeks Kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Rp. 11.197.797.000
	JUMLAH	Rp. 11.197.797.000

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara

Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
NIP. 196003091985031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Rifqi Adrian Kriswanto, S.E.,M.Si.
NIP. 197204291998031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muji Raharjo Drajat Santoso, Bc.I.P.,S.H.,M.M.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Ramli. HS, S.E.,M.A.P.	Muji Raharjo Drajat Santoso, Bc.I.P.,S.H.,M.M.
NIP. 196003091985031001	NIP. 196209031986031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	90%
	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di wilayah	Presentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90%
2	Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persaentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	100%
3	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang taat hukum	Menurunnya Presentase Residivis	1%
4	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Presentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 889.924.000
	JUMLAH	Rp. 889.924.000

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara

Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
NIP. 196003091985031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Muji Raharjo Drajat Santoso, Bc.I.P.,S.H.,M.M.
NIP. 196209031986031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filianto Akbar, S.E.,M.M.
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Ramli. HS, S.E.,M.A.P.	Filianto Akbar, S.E.,M.M.
NIP. 196003091985031001	NIP. 196509031985031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	7,3
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 889.924.000
	JUMLAH	Rp. 889.924.000

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara

Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
NIP. 196003091985031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Filianto Akbar, S.E.,M.M.
NIP. 196509031985031001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Harniati, S.H.,LL.M.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Ramli. HS, S.E.,M.A.P.	Dr. Harniati, S.H.,LL.M.
NIP. 196003091985031001	NIP. 196805301998032001

PERJANJIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
MALUKU UTARA

1. ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	3.0
		Presentase layanan program AHU di kantor wilayah yang diselesaikan	80%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.260.000.000
	JUMLAH	Rp. 2.260.000.000

2. KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	50 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 504.732.000
	JUMLAH	Rp. 504.732.000

3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Prersentasi rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

PERJANJIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 70.048.000
	JUMLAH	Rp. 70.048.000

4. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Hukum litigasi	63 orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalaui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 940.841.000
	JUMLAH	Rp. 940.841.000

5. HAK ASASI MANUSIA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan progaram aksi HAM	2 instansi pemerintah
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Desiminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Kantor Wilayah	Rp. 277.061.000
	JUMLAH	Rp. 277.061.000

6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Perda
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan hukum di wilayah	Rp. 152.448.000
	JUMLAH	Rp. 152.448.000

Ternate, 23 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Ramli. HS, S.E.,M.A.P.
NIP. 196003091985031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Dr. Harniati, S.H.,LL.M.
NIP. 196805301998032001